

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N



NASIB RENSTRA DI PENGUJUNG TAHUN



CALL FOR PAPERS

MATRA PEMBARUAN



Jurnal Inovasi Kebijakan Pemerintah

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2019, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu Mei dan November.

Naskah merupakan karya Ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Sumber referensi minimal 15 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).

Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*)

Lampirkan alamat korespondensi dan nomor telepon penulis.

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
082111393927 (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA
GARBA BUKUJAHAN DIGITAL

Crossref

Hampir lima tahun dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) berlaku. Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan BPP Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di dalamnya memuat berbagai target yang mesti dilakoni BPP Kemendagri.

Mencapai target yang tercantum di dalam Renstra nyatanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, selama berjalannya dokumen lima tahunan tersebut, kerap diwarnai berbagai dinamika yang turut andil memengaruhi capaian Renstra. Dinamika yang dimaksud, seperti adanya penambahan prioritas kebijakan, pemangkasan anggaran, dan beberapa persoalan lainnya. Akibatnya, target yang sebelumnya tidak ada di dalam Renstra kemudian dimasukkan ke dalam rencana kerja sebagai target tahunan, sekaligus turunan dari Renstra. Pemangkasan anggaran juga berdampak pada pengurangan target kerja setiap tahunnya yang sebelumnya sudah tersusun di dalam Renstra.

Pada edisi April ini, Media BPP berusaha menguliti berbagai persoalan yang menyandung jalannya Renstra selama hampir lima tahun. Sekaligus menyuguhkan upaya

BPP Kemendagri untuk tetap menjadikan kegiatannya berkualitas meski dengan segala keterbatasan yang ada. Langkah itu salah satunya, dapat dilihat melalui keterlibatannya dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program (Rakorsungram) bersama berbagai komponen Kemendagri, dan beberapa pihak luar. Forum tersebut bertujuan untuk menyusun topik kelitbang yang kemudian menjadi tawaran bagi program kegiatan Puslitbang BPP Kemendagri. Selain itu, capaian dan kendala masing-masing puslitbang dalam menjalankan Renstra pun turut dihadirkan, yang dikemas melalui rubrik Jendela BPP.

Tidak hanya menyoal Renstra, berbagai informasi menarik lainnya telah disajikan ke dalam aneka rubrik. Mulai dari aktivitas BPP Kemendagri, mengenal lebih dekat Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Carunia Mulya Firdausy, dan beberapa informasi lainnya.

Berbagai narasi yang hadir, merupakan upaya menjadikan peran BPP Kemendagri kian meningkat. Langkah ini diharapkan menjadi titik semangat agar meraih prestasi yang lebih gemilang. Sekaligus memahamkan kepada pembaca ihwal pentingnya peran litbang dalam kemajuan bangsa.

Redaksi...



MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	ANSELMUS TAN KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
REDAKSIMEDIABPP@GMAIL.COM

Putusan MK Tentang Suket

Dalam pemilihan umum nanti, Putusan Mahkamah Konstitusi memperbolehkan surat keterangan (Suket) bagi penduduk yang belum memiliki KTP-el. Bagaimana pendapat Kemendagri terkait hal ini. Karena hal ini bisa saja menjadi isu menarik, yang memunculkan logika sebagian orang dalam mendelegitimasi keputusan hasil pemilu.

- Pembaca Media BPP-

Secara hukum dan konstitusi, keputusan MK adalah final dan mengikat yang erat kaitannya dengan penyelenggara Pemilu. Dalam beberapa kesempatan, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan, Kemendagri akan menunggu tindak lanjut KPU atas putusan tersebut. Posisi Pemerintah melalui Kemendagri hanya pada tataran dukungan atau supporting saja, sementara keputusan untuk mengeksekusi ada di tangan penyelenggara Pemilu. Selain itu, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengeluarkan instruksi kepada jajaran Dukcapil seluruh Indonesia untuk melakukan percepatan perekaman KTP-el hingga tetap memberikan layanan di hari libur.

Redaksi

Perlu IT Support

Pemilu sudah semakin dekat, tetapi saya melihat data di beberapa media, partisipasi pemilih masih sangat minim. Pertanyaan saya apa upaya yang telah dilakukan Kemendagri dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih?

- Pembaca Media BPP-

Kesuksesan Pemilu Serentak 2019 ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih sebesar 77.5 persen seperti yang ditargetkan penyelenggara Pemilu dan juga Pemerintah. Sampai saat ini baru tiga provinsi yang berdasarkan hasil pemetaan mencapai lebih 77.5 persen, yakni Papua, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. karena

masih banyak provinsi yang capaian partisipasi pemilih diperkirakan di bawah target 77.5 persen. Meningkatkan partisipasi pemilih bukan hanya menjadi tugas Kemendagri semata, tetapi juga tugas semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Kemendagri sudah mengimbau kepada semua pemangku kepentingan di daerah harus bersinergi dan kerja sama untuk menaikkan partisipasi pemilih. Khususnya lembaga penyelenggara Pemilu dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019.

Redaksi

Peneliti BPP

Saya melihat minimnya peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal internalnya sendiri seperti Jurnal Bina Praja dan Matra Pembaruan atau jurnal di luar BPP Kemendagri. Hal ini bisa dilihat dari data Sinta Ristekditi yang ada. Peringkat lembaga BPP masih jauh dari lembaga riset lainnya. Padahal program penelitian di BPP Kemendagri dilakukan setiap tahun. Padahal saya sangat membutuhkan hasil-hasil riset Kemendagri untuk referensi penelitian ilmu pemerintahan dan politik. Apakah tidak ada kewajiban, Peneliti yang ada di BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah?

- Pembaca Media BPP-

Diakui atau tidak memang faktanya produktivitas peneliti BPP Kemendagri menulis di jurnal ilmiah sangat minim. Bisa dikatakan tidak sampai 100 persen dari peneliti yang ada, yang rutin menulis di jurnal ilmiah. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, jurnal ilmiah yang terakreditasi semakin menaikkan standar penulisan, sehingga para peneliti merasa kesulitan. Atau bisa juga karena kurangnya pendampingan cara penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar. Di masa depan kita harapkan peneliti BPP Kemendagri bisa produktif menulis...

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email redaksimediabpp@gmail.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 4 NO 2 | MARET-APRIL 2019

BPP DAERAH **32** UPT LITBANG BAPPEDA KABUPATEN PEMALANG MENUMBUHKAN FUNGSI TECHNOPARK

Tidak memiliki bangunan fisik technopark layaknya BPP Daerah lain, UPT Litbang Bappeda Kabupaten Pemalang justru menumbuhkan fungsinya. Edukasi, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penggunaan teknologi tepat guna dihadirkan dalam mendukung pengembangan komoditas lokal. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

DAERAH **36** TIDAK LAGI MENJADI DAERAH PERSINGGAHAN

Kabupaten Pemalang bukanlah destinasi utama wisatawan. Ia hanya daerah persinggahan pengunjung yang hendak ke berbagai daerah di pulau Jawa. Pemalang bukan lagi daerah persinggahan, tetapi juga bisa menjadi daerah tujuan untuk memanjakan diri dan bersenang-senang.



LEBIH DEKAT **40** CARUNIA MULYA FIRDAUSY, PROFESOR RISET BIDANG EKONOMI LIPI

TEMUKAN KONSEP AKURAT MENGUKUR GARIS KEMISKINAN MULTI DIMENSI

Berawal dari pengerjaan tugas akhir sewaktu menempuh gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor, yang mengkaji persoalan nelayan di daerah transmigrasi Papua, membawa Carunia Mulya Firdausy, Profesor Riset Bidang Ekonomi LIPI lebih menyukai dunia penelitian.

AKTIVITAS **6-9**

JENDELA BPP **18-27**

GAYA HIDUP **42**

SAINS DAN TEKNOLOGI **43**

RESENSI BUKU **44**

RESENSI FILM **46**

SASTRA **48**

KOMIK **51**

KILAS BERITA **52**

OPINI

MENGELOLA PLBN SKOUW **54**

KERJA SAMA MENGENDALIKAN INFLASI DAERAH **56**

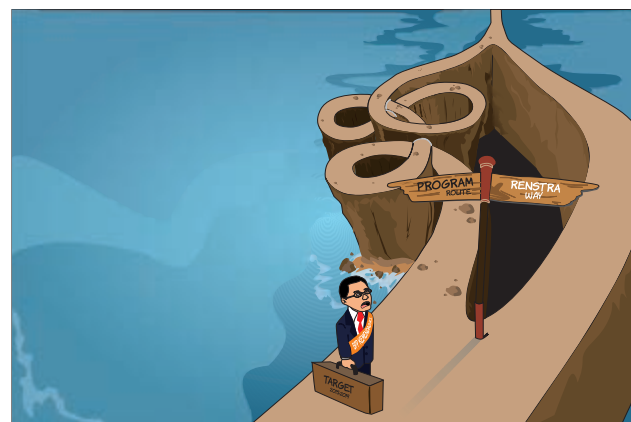
CATATAN

WAJIB COBLOS! **58**

LAPORAN UTAMA **10-27**

NASIB RENSTRA DI PENGUJUNG TAHUN

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) hampir lima tahun berlaku. Namun target hasilnya belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan dengan target Rencana Kerja tahunan menjadi musababnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada edisi kali ini Media BPP berupaya mengupasnya, mencari tahu jawabannya.



Anselmus Tan Raih Gelar Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan

BANDUNG – Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Anselmus Tan mendapat gelar Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan. Kelulusan dengan predikat sangat memuaskan tersebut didapatkan setelah menjalani sidang promosi doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (3/13).

Dihadapan Tim Promotor Anselmus memaparkan disertasi berjudul *Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Bogor Jawa Barat*. Penelitian tersebut berangkat dari fenomena rendahnya kapasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer/perimbangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, yang menjadi isu menarik yang dikaji oleh Anselmus. Dihadapan Tim Promotor, Anselmus menyatakan, fenomena tersebut berimplikasi terhadap rendahnya otonomi fiskal daerah dan rendahnya diskresi pengeluaran daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah untuk penyediaan barang dan jasa publik bagi kepentingan masyarakat.

“Pasalnya sebagian dana transfer/perimbangan telah diarahkan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk membiayai program-program strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” terang Anselmus.

Dari hasil penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Anselmus menemukan tiga hal penting di antaranya; *Pertama* selama ini kapasitas

fiskal daerah ditentukan oleh ketepatan implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung; *Kedua* ketepatan implementasi desentralisasi fiskal mensyaratkan, kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan pajak dan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus sepadan dengan penetapan tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah (sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah); *Ketiga* efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung mensyaratkan, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung harus tepat sesuai hasil analisis ekonometrik terhadap data nilai produk domestik regional bruto (pertumbuhan ekonomi daerah), serta harus sesuai kemampuan aparatur pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah tidak langsung.

“Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor penyebab rendahnya kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan prospek peningkatan kapasitas fiskal daerah berdasarkan perspektif implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung,” ucap Anselmus di hadapan Tim Promotor.

Untuk itu, demi meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Anselmus merekomendasikan dua hal di antaranya, pemerintah pusat perlu melakukan perubahan dalam implementasi desen-



tralisasi fiskal dan pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menyambut gagasan Anselmus Tan yang mengkritisi makna desentralisasi dan makna otonomi daerah yang mencakup pengelolaan keuangan daerah. Bagi Bahtiar, temuan Anselmus Tan dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan otonomi daerah yang tepat.



“Ada kritisi makna desentralisasi dan makna otonomi daerah. Tentu salah satu elemen dasar dari Tujuh elemen dasar Otda itu ada soal keuangan daerah, beliau mengungkapkan, faktor pengelolaan keuangan daerah ini tidak berkolerasi terhadap tingkat kemandirian daerah. Selain itu, terlalu banyak kewenangan yang diterima daerah dan hampir sama segalanya sehingga daerah ‘gagal fokus’. Pak Ansel setuju kembali ke konsep lebih pada ajaran

rumah tangga riil. Jadi apa yang didecentralisasikan kepada daerah adalah sesuai dengan potensi daerah. Saya kira ini paradigma baru dan rekomendasi beliau adalah mengubah regulasi kebijakan Otda ke depan, khususnya hubungan pusat dan daerah ke depan,” papar Bahtiar.

Acara pemberian gelar doktor tersebut juga dihadiri para pejabat di Lingkungan Kemendagri, tidak terkecuali Kepala BPP Kemendagri Dodi Ri-

yadmadji. Dalam kesempatan tersebut Dodi mengucapkan selamat atas raihannya gelar doktor yang diperoleh Anselmus Tan.

“Turut bahagia sekaligus bangga, semoga gelar doktor tersebut bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya terutama di bidang ilmu pemerintahan,” ucap Dodi.

■ SAIDI RIFKY

Mendorong Kemandirian Daerah Melalui Retribusi

JAKARTA-Guna mendorong kemandirian daerah lewat potensi dan kontribusi retribusi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) melalui Pusat Litbang pembangunan dan Keuangan Daerah menggelar *Focused Grup Discussion (FGD)*. Acara tersebut dilaksanakan di Aula BPP Kemendagri, Selasa (5/3).

Gelaran tersebut menghadirkan tiga narasumber di antaranya, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan Hamdani, Kasubdit Wilayah I Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Sumarso, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Gideon Purba. Selain itu hadir pula peserta dari berbagai perangkat daerah.

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Horas Mauritz Panjaitan menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kajian aktual bertajuk analisis potensi dan kontribusi retribusi daerah dalam rangka kemandirian. Ia berharap melalui FGD bisa mendapat masukan terkait permasalahan retribusi di daerah sehingga mampu mendorong kemandirian daerah. Sebab nantinya hasil FGD tersebut akan menjadi rekomendasi bagi kebijakan Kemendagri. “Memvalidasi dan mengkroscek kembali sehingga akan lebih optimal dalam memberikan masukan,” tutur Mauritz.

Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah melakukan kajian

di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Kajian tersebut menemukan beberapa kendala dalam pengelolaan potensi daerah menjadi sumber retribusi. Seperti tidak adanya regulasi yang mengatur penarikan retribusi tempat wisata karena aturan sebelumnya telah dihapus. Selain itu, belum adanya regulasi yang mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi persoalan tersendiri.

“Kendala juga ditemui pada pemanfaatan teknologi yang masih kurang. Kondisi ini diakibatkan minimnya sumber daya manusia yang mumpuni. Selain itu, sarana infrastruktur yang belum terbangun menjadi kendala penerimaan retribusi menjadi tertunda,” ungkap Mauritz.

Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Gideon Purba mengaku belum maksimal dalam melakukan pengelolaan retribusi. Hal itu diakibatkan melalui beberapa faktor, seperti letak geografis sampai dengan kebijakan Bupati.

Letak geografis Kabupaten Simalungun yang terdiri dari beberapa kota kecil diakui menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan retribusi. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan tidak terkonsentrasi. “Otomatis retribusinya terpecah-terpecah dan tidak terkonsentrasi,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Gideon Purba, saat menjadi pembicara *Focused Grup Discussion (FGD)*, mengkaji hasil riset desain Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah



Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), yang berlangsung di Aula BPP, Selasa (5/3).

Ia menyebutkan, misalnya retribusi dari lahan parkir di jalan umum yang dinilai masih minim. Hal ini akibat lahan parkir yang sedikit karena luas masing-masing kota yang terlalu kecil. Kondisi ini membuat pemerintah ragu menempatkan petugas atau pun bekerja sama dengan pihak ketiga. “Dengan angka yang kecil itu ini memang seperti kurang perhatian, itu



kelemahan kami yang ke depan akan kami tingkatkan,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan persoalan retribusi juga tersandung kebijakan Bupati Simalungun. Bupati beranggapan retribusi hanya identik dengan menyengsarakan masyarakat, sehingga lebih memilih melakukan pembiaran.

“Untung masyarakat bergairah menjalani hidupnya, ngapain kita berat-beratkan,” ujarnya menirukan jawaban

Bupati. Padahal pihaknya telah mengkaji potensi untuk daerah yang bisa dijadikan sumber retribusi.

Purba menyebutkan potensi tersebut bisa melalui pemanfaatan usaha yang dikelola masyarakat, seperti keberadaan warung. Jika aspek tersebut dimanfaatkan maka akan memberikan retribusi yang cukup besar. “Misalnya 2000 perak saja perhari, berapa ribu itu (warung)?” tanyanya.

Ia mengaku sementara ini keberadaan

usaha masih dibiarkan begitu saja. Bahkan tanah milik pemerintah daerah juga dikelola menjadi lahan usaha. pembiaran tersebut dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Harapannya jika ekonomi berkembang barulah dilakukan pemungutan retribusi.

“Kekayaan daerah itu kita biarkan dikelola masyarakat, itulah salah satu kelemahan dan kelebihan kami,” terangnya.

■ MUJAENI

LAPORAN UTAMA

NASIB RENSTRA DI PENGUJUNG TAHUN

Rencana Strategis (Renstra) yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) hampir lima tahun berlaku. Namun target hasilnya belum sepenuhnya tercapai. Perbedaan dengan target Rencana Kerja tahunan menjadi musababnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada edisi kali ini Media BPP berupaya mengupasnya, mencari tahu jawabannya.

TA
2



PROGRAM
ROUTE

RENSTRA
WAY

BPP KEMENDAGRI

TARGET
2015-2019

Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku setiap lima tahun sekali. Rancangan tersebut mengacu pada Renstra Kemendagri yang disusun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Mohammad Noval Labadjo menyebutkan, Renstra disusun melalui visi dan misi menteri yang mencakup tugas, fungsi, serta arah kebijakan prioritas Kemendagri. Dari acuan tersebut kemudian diturunkan melalui program dan kegiatan yang dijalankan masing-masing komponen Kemendagri. Baik unit eselon I dan II yang berpedoman pada Rencana Kerja (Renja), sebagai target tahunan.

“Selain itu, Renstra juga mengacu pada janji-janji kampanye Presiden terpilih sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMN. Termasuk pada periode sekarang yang mencanangkan sembilan Nawa Cita dalam semangat kerjanya. Semangat tersebut kemudian ikut diformulasikan menjadi sasaran-sasaran strategis dalam Renstra,” kata Supriyoko Staf Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja, Bagian Perencanaan BPP Kemendagri menambahkan.

Penyebab capaian berubah

Sebagai turunan Renstra, mestinya Renja disesuaikan dengan yang tercantum dalam rancangan lima tahunan tersebut. Namun dalam perjalananannya,

Renja tidak selalu persis sesuai Renstra karena merespons dinamika yang berjalan. Noval menyebutkan, dinamika tersebut satu di antaranya adalah adanya prioritas tambahan yang mesti diakomodasi dalam kerja tahunan. “Kita punya indikator-indikator capaian prioritas untuk dilaksanakan dalam Renstra. Namun dalam tahun berjalan ada prioritas-prioritas yang perlu diakomodasi. *Nah*, jadi kita *nggak* sekadar ingin menambah-nambah indikator, karena pada dasarnya ada amanat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah), sehingga kita harus tindak lanjut dalam rencana kerja,” ungkap Noval saat ditemui *Media BPP* di ruang kerjanya, Kamis (28/02/2019).

Meski demikian, Noval meyakinkan perubahan susunan tersebut tidak memengaruhi BPP Kemendagri dalam menjalankan kerjanya secara berarti. Penambahan indikator, menurutnya justru memberi dukungan dalam mencapai sasaran strategis. Sebab, banyak menyangkut prioritas nasional, khususnya terkait pencapaian target penerapan inovasi daerah.

Sejalan dengan Noval, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, BPP Kemendagri David Julianto Simanungkalit berpendapat, pelaksanaan RKP, nyatanya diikuti perubahan target, anggaran, dan nomenklatur kegiatan yang sebelumnya termuat dalam dokumen Renstra. “Misalnya di Renstra tidak ada indeks inovasi daerah, di RKP ada indeks inovasi daerah. Walaupun terdapat beberapa penambahan indikator baru dalam RKP, namun semua target tahunan yang dilaksanakan masih sejalan dan memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran strategis Renstra,” kata David saat ditemui *Media BPP*, Senin (4/3/2019).

Menjadikan RKP sebagai landasan kerja setiap tahunnya tidak memberikan rasa aman. Sebab, baik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Biro Perencanaan (Biroren)



selalu melakukan evaluasi berdasarkan dokumen Renstra. Padahal dokumen tersebut sudah mengalami banyak perubahan. Oleh karenanya, keselarasan dua dokumen itu tidak mungkin terwujud. Ia menekankan, sejak awal mestinya, Kemendagri melakukan kesepakan penilaian, apakah berdasarkan dokumen Renstra atau RKP. Jika tetap mengacu pada Renstra harusnya dilakukan revisi, karena sudah tidak lagi sesuai. “Secara RKP semua kegiatan terwujud, tetapi kalau dilihat Renstra tidak terwujud,” jelas David.

Namun upaya revisi tidak mudah dilakukan, karena membutuhkan proses yang panjang, serta dapat memengaruhi semua komponen BPP Kemendagri. Kondisi ini dinilai menjadi





“

**JANGAN SAMPAI
TARGET JUSTRU
MEMPERSULIT KERJA
PENCAPAIANNYA DI
KEMUDIAN HARI**

alasan kuat mengapa perubahan muatan Renstra urung dilakukan. “Pernah kita dulu mengajukan revisi indikator, tapi tidak disetujui oleh orang Biroren (Biro Perencanaan),” tutur Sukino Staf Subbagian Data dan Evaluasi Kinerja.

Menurut Noval, revisi Renstra lebih baik tidak dilakukan karena menilai dokumen tersebut sudah merupakan komitmen awal. Ia menjelaskan, saat proses perumusan Renstra, pihaknya telah melakukan konsolidasi bersama masing-masing komponen Kemendagri, termasuk melibatkan pimpinan di lingkup BPP Kemendagri



sebelum Renstra ditetapkan. Hal itu untuk memperkuat arah kebijakan dan muatan Renstra pada masing-masing komponen. Menyelaraskan muatan Renstra dengan Renja, hanya akan berdampak pada hasil yang kelihatannya memuaskan. “*Nah*, kalau kita merevisi Renstra artinya kita akan berupaya untuk memperkecil deviasi antara Renja dengan Renstra yang sudah disepakati bersama tersebut,” katanya.

Mengukur capaian Renstra, menurutnya dapat dinilai melalui aspek pelaksanaan pada setiap tahunnya. Sebab, berbagai kemungkinan dalam menerjemahkan arahan Renstra ke dalam Renja bisa saja terjadi. Misalnya, penyusunan program yang tidak sesuai dengan Renstra, atau dukungan anggaran yang kurang memadai. Selain itu, pemahaman dan komitmen perlu dibangun untuk mencapai target lima tahunan tersebut.

Kepala Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Perencanaan Elisabeth Eni PL mengatakan, untuk menghindari adanya perubahan berarti dapat dilakukan dengan memerhatikan beberapa aspek. Salah satunya target yang dicanangkan di dalam Renstra. Ia menekankan, jangan sampai target justru mempersulit kerja pencapaiannya di kemudian hari. “Pokoknya acuan-

nya agar merujuk pada dokumen-dokumen perencanaannya, di samping adanya pemahaman dan komitmen yang tinggi terhadap pencapaian dan cara mencapai target itu,” ungkapnya.

Senada dengan Elisabeth, Sukino menekankan penentuan target memang harus hati-hati. Namun Renstra merupakan rencana, sehingga hasilnya terkadang tidak harus tepat. “Namanya juga rencana, cuma harus mendekatilah,” terangnya.

■ MUJAENI





LAPORAN UTAMA

KEMBALI KE JALAN RENSTRA

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, target besar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), adalah mendorong Pemerintah Daerah menerapkan inovasi daerah. Program yang dijalankan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Inovasi Daerah BPP Kemendagri tersebut, menargetkan 100 persen provinsi, 30 persen kabupaten dan kota. Namun dalam perjalanannya program itu terkendala oleh anggaran yang kurang memadai.

Meski sebenarnya anggaran yang disusun dalam dokumen lima tahunan sudah mengacu data proyeksi keuangan yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun pada prosesnya, Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan terutama pada kegiatan yang dinilai kurang efisien. Selain itu, pemberian alokasi anggaran juga didasarkan pada serapan tahun sebelumnya. BPP Kemendagri dinilai masih kurang maksimal dalam melakukan serapan, sehingga berdampak pada perolehan anggaran berikutnya, yang berujung terganggunya pelaksanaan program.

Melihat kondisi demikian, Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri Mohammad Noval Labadjo berusaha mendorong agar program inovasi daerah dimasukkan ke dalam prioritas nasional, yang akhirnya disetujui Bappenas. "Karena kalau masuk prioritas nasional, itu ada pengawalan khusus. Jadi ada komitmen kita juga untuk mencapai hasil, ada juga *backup* anggaran memadai," jelas Noval saat ditemui *Media BPP* di ruang kerjanya, Kamis (28/02/2019).

Meski target Renstra dilimpahkan pada Puslitbang Inovasi Daerah, bukan berarti puslitbang di lingkup BPP Kemendagri tidak mendapat beban. Justru dukungan perlu dilakukan, yakni melalui kegiatan kelitbang yang berorientasi pada ditindaklanjutinya rekomendasi.

Namun Noval menyayangkan, penerjemahan Renstra setiap tahunnya kurang terfokus dan bersinergi. Akibat tidak memiliki target topik kelitbang yang jelas. “Mestinya kita sudah ada target topik-topik kelitbang yang sudah kita tetapkan, tetapi di kita tidak ada,” katanya.

Kondisi ini salah satunya diakibatkan penggunaan indikator kelitbang yang masih bersifat umum, yaitu sesuai dengan nomenklatur masing-masing puslitbang. Meski dengan indikator tersebut berdampak positif terhadap kajian yang tidak terlalu banyak direvisi. Namun kelemahannya, indikator dapat dimaknai secara luas jika tidak dikawal baik saat proses perumusan program. Meski hal itu bisa dihindari dengan tetap menjadikan Renstra sebagai acuan kegiatan. “Kita sudah mempunyai beberapa fokus, terkait sasaran yang ada di Renstra Kemendagri dengan Renstra Litbang (BPP Kemendagri), mestinya kajian mereka tidak keluar dari koridor itu,” jelas Noval.

Lolosnya program yang tidak sejalan dengan semangat Renstra, diakui berada di luar kendali Bagian Perencanaan. Sebab, yang disampaikan saat pelaporan hanyalah indikator secara umum. Selanjutnya, penerjemahan indikator dirumuskan pada masing-masing puslitbang yang nantinya melahirkan judul kajian. Ia menyarankan agar kegiatan kelitbang tidak hanya melihat substansi umum, tetapi juga harus mendukung peningkatan kualitas Kemendagri. “Harusnya prioritas yang dibutuhkan komponen atau kelitbang yang perlu kita lakukan, guna memberikan dukungan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri,” tegasnya.

Dampak penyertaan topik

Pengajuan kegiatan yang disertai topik yang jelas dinilai mampu menjadi bahan pertimbangan pengalokasian anggaran. Noval mencontohkan, jika puslitbang mengajukan sepuluh kajian tanpa topik yang jelas, maka akan dialokasikan sesuai dengan angga-



ran yang tersedia. Namun saat kajian menyertakan topik yang dinilai prioritas, bukan tidak mungkin pemberian anggaran bisa lebih besar karena landasannya jelas. “Makanya kita itu harus ada topik, harus ada tema di kegiatan kelitbang itu, kalau *nggak* kita bakal ditanggung indeks terus,” saran Noval.

Namun sebenarnya, setiap awal tahun BPP Kemendagri terlibat dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Program (Rakorsungram) bersama dengan komponen Kemendagri. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menggandeng pihak luar yang dinilai membantu menghasilkan keputusan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai topik kajian. Kepala Sub Bagian Penyusunan



Program dan Anggaran, BPP Kemendagri David Julianto Simanungkalit menyebutkan, pembahasan Rakorsungram akan menghasilkan beragam topik kegiatan yang mesti dilakukan oleh BPP Kemendagri. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah matrik rencana kerja, dengan harapan diterapkan oleh masing-masing Puslitbang BPP Kemendagri.

Namun kenyataannya matrik sebagai hasil kajian formal tidak selalu mendapat respons yang baik. David menyayangkan kegiatan yang dilakukan justru dinilai masih kurang dari yang diharapkan. Padahal menurutnya, dengan acuan matrik masing-masing puslitbang tinggal menjalankannya secara teknis. “Keinginan kami mereka melaksanakan kelitbang, ber-



dasarakan matrik yang sudah dibahas,” terangnya.

Selain melaksanakan Rakorsungram, BPP Kemendagri juga mengikuti Forum Majelis Pertimbangan, yang anggotanya adalah masing-masing pimpinan komponen Kemendagri. Wadah tersebut merupakan lanjutan dari Rakorsungram yang biasanya berlangsung pada akhir tahun. Jika Rakorsungram agendanya menyusun topik kajian, pada forum ini bertujuan mengawal, menjaga, serta sampai pada pemanfaatan hasil kajian berdasarkan topik yang telah dirancang. “Nanti di situ Kepala BPP Kemendagri memberikan hasilnya secara simbolik,” terang David.

Namun karena tidak semua hasil matrik dijadikan dasar kegiatan, akibatnya apa yang disampaikan pada forum tersebut menjadi tidak sesuai. Padahal komponen meminta laporan berdasar-

kan rekomendasi topik yang dihimpun pada awal forum. Meski demikian, menurut David komponen juga memiliki kelemahan, karena tidak memahami apa yang dibutuhkannya. Saat mereka memaparkan perihal topik-topik kelitbang yang menunjang kegiatan komponen, justru hanya dihadiri staf yang secara kapasitas tidak bisa mengambil kebijakan.

David mengaku, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memaksa puslitbang menjalankan rekomendasi topik, tetapi hanya sekadar mengarahkan agar berkenan menjalankannya. Secara eksplisit Bagian Perencanaan tidak berwenang untuk menyetujui atau menolak kajian yang bakal dilakukan oleh puslitbang. “Kami tidak ada wewenang untuk memberikan *punishment* atau *reward* ketika mereka melaksanakan matrik,” jelas David.

Di sisi lain, untuk mengukur kualitas kegiatan kelitbang, saat ini pihaknya juga belum memiliki indikator yang dinilai tepat untuk mengukur capaian kinerja *outcome*. Namun rencananya tahun ini indikator tersebut bakal disusun. “Sementara ini indikatornya adalah rekomendasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti, namun kemungkinan akan mengarah pada indeks kemanfaatan hasil kelitbang,” duganya.

Sedangkan Sub Bagian Data dan Evaluasi Kinerja, Bagian Perencanaan BPP Kemendagri yang diyakini mampu melakukan evaluasi, hanya mencatat capaian antara target Renstra dengan yang dijalankan oleh masing-masing puslitbang. Eko Santoso Kepala Sub Bagian Data dan Evaluasi Kinerja menjelaskan, pihaknya belum memiliki kemampuan untuk mengukur kualitas suatu kegiatan. Dirinya justru menyarankan agar hal itu dilakukan oleh lembaga lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun

pada perjalanannya tetap menanyakan musabab puslitbang apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai target. Senada dengan David, pihaknya juga tidak memiliki kuasa untuk memaksa, “Hanya mengimbuu saja agar target dikerjakan,” katanya

Diakui sesuai matrik

Terkait dengan penggunaan matrik hasil Rakorsungram, *Media BPP* berusaha mengonfirmasinya melalui puslitbang. Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Horas Mauritz Panjaitan menjelaskan, matrik merupakan satu dari sekian bahan pertimbangan penentuan topik kajian. Sebab pihaknya juga mendapat usulan dari berbagai daerah dan juga komponen. Namun prinsipnya keputusan yang diambil berdasar pada skala prioritas, dan tetap meminta persetujuan Kepala BPP Kemendagri.

Meski demikian, Mauritz menyebutkan hasil kelitbang pihaknya sudah mengacu dengan poin-poin yang disampaikan Rakorsungram.

Selain itu, ditemui di tempat berbeda, Kepala Bidang Administrasi

Kewilayahan Puslitbang Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa dan Kependudukan Agung Wijaya, menuturkan jika hasil Rakorsungram menjadi bahan pembahasan saat Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tingkat internal sebelum menentukan judul. Namun ia mengaku terkadang menemui topik yang tidak mengacu Renstra. Selain itu, keterbatasan anggaran berdampak pada tidak dikerjakannya semua usulan topik. Tetapi ia meyakini jika yang dikerjakannya tetap mengacu pada matrik tersebut. “Kalau masukannya terlalu banyak, sedangkan uang kita sedikit, berarti kita harus memilih, mana yang dengan uang sedikit kita bisa kerjakan,” kata Agung.

■ MUJAENI

KAJIAN AKTUAL ADALAH KUNCI

Dalam menjalankan kerja, Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Puslitbang Inovda) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) membagi 4 termin setiap tahunnya. Termin tersebut berisi tiga bulanan dengan masing-masing agenda. Pada triwulan pertama, Puslitbang Inovda menggelar *brainstorming* dan diskusi dengan melibatkan peneliti, pejabat struktural, dan beberapa daerah sampel, baik berasal dari daerah kurang inovatif, maupun yang telah melakukan inovasi. Hadirnya beberapa daerah tersebut sebagai pembanding agar membuahkan hasil yang diharapkan. Setelah memahami persoalan yang dihadapi, kemudian melahirkan judul kajian aktual. Pada periode ini kajian yang telah dirancang pun sekaligus dikerjakan

Pada triwulan kedua, Puslitbang Inovda mulai menyusun dan menyiapkan *tools* replikasi inovasi daerah untuk diterapkan, dengan mengacu pada hasil kajian. Triwulan ketiga implementasi alat replikasi inovasi daerah, dan triwulan terakhir dijadikan wadah penilaian sekaligus evaluasi.

Kepala Puslitbang Inovda Safrizal mengatakan, sebelum menentukan topik kajian, pihaknya melakukan beberapa pertimbangan, seperti dapat segera dimanfaatkan, dan berkaitan dengan program yang bakal dijalankan. “Kajian itu yang mendukung pekerjaan yang bakal dilakukan pada tahun itu (berjalan),” kata Safrizal saat ditemui Media BPP Kemendagri di ruangannya, Selasa (12/3).

Ia mencontohkan saat pihaknya akan mereplikasi inovasi di daerah perbatasan. Maka topik kajian yang

dilakukan adalah mencari jenis inovasi yang memungkinkan diterima oleh daerah tersebut. Begitu juga kajian yang dilakukan pada program prioritas nasional seperti penerapan inovasi di daerah tertinggal. Kajian merupakan bahan dukungan dalam melaksanakan program agar lebih saintifik dan memperhitungkan banyak hal, seperti baik buruk, untung rugi dan juga ketepatan sasaran program. “Jadi berkaitan, kajian itu langsung dapat kami gunakan sebagai model langsung yang dapat diterapkan, semua kajian kami seperti itu,” ungkap Safrizal.

Guna mempercepat hasil kajian, pihaknya kerap membagi tim sejumlah kajian yang dijalankan. Selain melipat waktu pengerjaan, langkah itu karena ada beberapa program yang memang harus selesai secara bersamaan. “Kajiannya juga singkat, cuma satu bulan tidak terlalu lama,” terangnya.

Safrizal menekankan, kajian yang berlangsung setiap tahunnya dilakukan dengan tidak meniru kegiatan sebelumnya. Hanya saja sebagai bentuk pengembangan dari kajian yang telah dilakukan. Ia mencontohkan, tahun sebelumnya mengkaji dua wilayah dan berikutnya empat wilayah. Masing-masing memiliki sasaran dan lokasi yang berbeda. “Jadi berbeda ruang lingkupnya dan tidak akan terjadi tumpang tindih,” jelasnya.

Selain itu, ia menyebutkan, Puslitbang Inovda selalu memperhatikan matrik yang dihasilkan saat Rapat Koordinator Penyusunan Program (Rakorsung-ram). Sebab matrik tersebut disusun berdasarkan hasil koordinasi yang melibatkan Puslitbang Inovda. Oleh karenanya muatan matrik selaras dengan keinginan Puslitbang Inovda. “Dalam menyusun matrik juga berdiskusi, bagian perencanaan tidak bisa



menyusun matrik kalau tidak berkoordinasi, artinya kalau sudah tersusun matrik berarti sudah melalui proses harmonisasi dan koordinasi,” katanya.

Capaian program

Salah satu capaian Puslitbang Inovda adalah dibuatnya program aplikasi bernama Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Aplikasi itu diawali dengan kajian terhadap layanan yang sering digunakan daerah. Dari hasil kajian didapati sejumlah temuan jenis aplikasi, seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, perizinan, dan sebagainya. Kemudian aplikasi Puja Indah digunakan sebagai alat replikasi inovasi daerah di lokasi tujuan. “Pusat inovasi itu tidak hanya kajian saja, tetapi juga bertugas mereplikasi mengaktifkan beberapa daerah yang



ditentukan di dalam program supaya inovatif, sekaligus menilai dan mengevaluasi,” terang Safrizal.

Sementara, capaian target Renstra di 2015-2019 diakui Safrizal telah terpenuhi, bahkan melampaui. Ia menyebutkan, setiap tahun untuk program prioritas nasional hanya menargetkan dua daerah tertinggal yang meningkatkan inovasinya. Namun aplikasi yang dibangun justru dapat diterapkan di daerah lainnya—bukan daerah tertinggal. Untuk tahun ini Safrizal menargetkan empat daerah tertinggal, seperti Seluma, Bangkalan, Ketapang, dan Lombok Barat. “Jadi untuk tahun ini ada empat daerah yang ditargetkan dari daerah tertinggal, menuju daerah yang lebih inovatif,” ungkapnya.

Safrizal mengatakan sampai saat ini sudah 60 persen provinsi, 30 persen Kabupaten dan kota yang menerapkan inovasi daerah. Menurutnya Puslitbang Inovda sebenarnya tidak mencantumkan provinsi di dalam target, melainkan hanya daerah tertinggal. Tetapi pihaknya melakukan bonus dengan mengubah metodenya sehingga dapat mengukur 60 persen provinsi menerapkan inovasi. Meski tidak diformalkan, pihaknya tetap mengerjakannya. “Ini ukuran kita sendiri lewat indeks inovasi daerah,” jelas Safrizal.

Kepala Bidang Pengembangan Inovda Saydiman Marto, menyebutkan pada 2018 sebanyak 50 daerah telah melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama untuk menerapkan Puja Indah. Selain itu, ia mengaku

mendapat belasan surat dari daerah yang meminta bekerja sama untuk menerapkan aplikasi tersebut. “Sudah 50 daerah yang MOU (*memorandum of understanding*) untuk bekerja sama menerapkan Puja Indah, dan surat yang masuk sudah belasan masuk di kita untuk ikut menerapkan Puja Indah,” kata Saydiman.

Selain itu menurut Safrizal, pihaknya pernah mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan komponen, dalam hal melakukan pelayanan terhadap daerah. Hasilnya kemudian diteruskan ke komponen untuk diterapkan. Alhasil, berdasar kajian itu beberapa komponen mulai melakukan perubahan di sistem pelayanannya. Ia mencontohkan Sekretariat Jenderal Kemendagri yang telah mengembangkan Unit Layanan Administrasi (ULA). Namun, untuk tahun ini kajian semacam itu tidak diagendakan, karena lebih diarahkan untuk mendukung program Puslitbang Inovda.

Angka capaian daerah menerapkan inovasi tersebut dibenarkan Kepala **Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Bagian Perencanaan** David Julianto Simanungkalit jika merujuk pada indeks Puslitbang Inovda. Namun jika dilakukan penggabungan, angka tersebut sebenarnya sudah mengalami peningkatan sejak 2018 menjadi 80 persen atau 30 provinsi dari 34 target yang menerapkan inovasi daerah. Ia menyebutkan sebelas provinsi belum digabungkan ke dalam indeks. Sementara untuk capaian kabupaten/kota mencapai 33,6 persen atau setara 189 dari total 514 kabupaten/kota. Angka tersebut melampaui target yang semula hanya 30 persen kabupaten/kota. Berbeda dengan Safrizal, David menjelaskan target 100 persen provinsi menerapkan inovasi daerah merupakan susunan formal sejak ditetapkan dalam Renstra Kemendagri dan BPP Kemendagri. “Kalau data indeks memang baru 60 persen, sekira 11 provinsi lagi belum masuk indeks,” terang David.

■ MUJAENI

MENERIMA MASUKAN UNTUK MENENTUKAN TOPIK KAJIAN

Seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) lainnya, Puslitbang Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Desa dan Kependudukan (Adwil Pemdes) dalam kerjanya juga dipayungi oleh Rencana Strategis (Renstra). Dokumen lima tahunan tersebut kemudian diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) yang merupakan target tahunan.

Salah satu hal yang penting dalam kajian setiap tahun, yaitu adanya topik yang jelas. Guna menjaring topik, pada akhir tahun Puslitbang Adwil Pemdes terlibat dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang digelar Bagian Perencanaan BPP Kemendagri. Forum tersebut melibatkan komponen Kemendagri yang masing-masing saling mengusulkan berbagai isu aktual ataupun strategis sesuai dengan perannya. Isu yang terhimpun selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan untuk dijalankan masing-masing Puslitbang termasuk Puslitbang Adwil Pemdes pada tahun anggaran berikutnya.

Menurut **Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan Agung Wijaya**, hasil yang didapat pada Rakortek, selanjutnya dibahas dalam forum internal, atau sering disebut Rakortek tingkat Puslitbang. Dalam Rakortek internal itu pihaknya juga melibatkan komponen terkait, seperti Ditjen Bina Adwil, Kependudukan, dan Pemerintahan Desa. Forum itu berguna untuk menyamakan persepsi satu sama lain. Mengenai waktu pelaksanaan bergantung pada anggaran yang ada. “Itu biasanya tergantung anggaran, kalau anggarannya cepat, cepat juga kita laksanakan. Namun biasanya Rakortek internal berlangsung pada awal tahun,” kata Agung saat ditemui *Media BPP* di ruang kerjanya, Jumat (8/3).

Pertimbangan Rakortek internal

Selain membawa hasil Rakortek yang digelar Bagian Perencanaan, matrik yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Penyusunan Program Kerja (Rakorsunggram) juga menjadi bahan pertimbangan saat Rakortek di tingkat puslitbang. Namun ia menyebutkan, terkadang menemui matrik yang diusulkan juga tidak mengacu pada Renstra. “Entah Renstra yang salah, atau matriknya yang salah,” kata Agung.

Ia membenarkan jika pada perjalanan Renstra tidak selalu menjadi acuan, akibat adanya kebijakan pemerintah pada tahun berjalannya dokumen lima tahunan tersebut. Salah satu kebijakan, seperti adanya pemangkasan anggaran. Pada rencana awal, misalnya, Puslitbang Inovda mampu menjalankan delapan kegiatan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata hanya dapat melakukan empat kajian. “Tadinya mungkin yang delapan itu bisa mengacu ke Renstra semua kegiatannya, namun karena cuma empat berarti kita harus memilih,” tambah Agung.

Dalam proses memilih tersebut, Agung tidak memungkiri terkadang luput menjadikan Renstra sebagai acuan. Kondisi tersebut bisa terjadi karena kebijakan Kepala Puslitbang yang melihat hal lain lebih penting untuk dikaji dan sebagainya. Meski demikian, ia meyakinkan jika yang dilakukan bidangnya tetap berdasarkan Renstra. Dengan kondisi matrik yang ada, pihaknya tetap menjadikannya sebagai bahan pertimbangan. Namun jika masukannya terlalu banyak, maka dilakukan proses seleksi karena anggaran terbatas. “Kita kerjakan apa yang kita mampu, tetapi berdasarkan acuan matrik,” jelasnya.



Tidak hanya itu, dalam forum internal juga muncul berbagai isu terbaru yang juga menjadi bahan pertimbangan keputusan. Baik dari komponen maupun hasil pembacaan kondisi masyarakat terkini. Berbagai isu yang terkumpul kemudian dimintai tanggapan serta masukan komponen yang terlibat. “Tetapi intinya forum tersebut berasal dari Rakortek di tingkat Bagian Perencanaan,” jelasnya. Ia meyakinkan jika Kepala Puslitbang Adwil Pemdes selalu mengacu pada dokumen tersebut.

Rakortek di tingkat internal, kemudian melahirkan matrik terbaru, yang selanjutnya diturunkan menjadi judul kajian. Saat penentuan judul, dirinya mengaku tetap melakukan koordinasi dengan komponen terkait. Koordinasi tersebut berupa pengajuan proposal untuk dimintai pendapat. “Saya *kan* di Bidang Adwil, saya koordinasi dengan Komponen Adwil,” katanya.

Jika komponen menyetujui judul yang ditawarkan, maka kajian tersebut bakal diteruskan. Tidak hanya itu, persetujuan Kepala BPP Kemendagri juga di-



butuhkan. Biasanya Kepala BPP akan mengoreksi detail dalam susunan rancangan. Agung menilai hal itu dilakukan untuk menemukan arah kegiatan yang benar. Berdasar pengalamannya, koreksi diberikan dengan tidak banyak mengubah susunan. Hanya saja misalnya, ruang lingkup yang dinilai terlalu luas, kadang perlu dipersempit, karena dianggap akan menemukan kendala saat pengerjaan. “Karena kalau kajian itu *kan* kecil dananya cuma Rp 70 juta, dan waktunya cuma satu bulan,” katanya.

Target dan capaian

Saat ditanya perihal target Renstra, Agung menjelaskan jika apa yang dijalankan masih belum sesuai dengan target dokumen lima tahunan tersebut. Kondisi ini salah satunya akibat adanya pemotongan anggaran. Meski begitu dirinya mengaku tidak bisa berbicara banyak ihwal target, karena baru sekira enam bulan menempati posisinya sekarang. Dan hanya bisa menjelaskan capaian yang sudah dilakukan

selama dirinya menjabat.

Akhir 2018 menjadi titik perjuangan awal Agung, karena mesti melanjutkan target tahunan yang belum terlaksana sama sekali pada tahun anggaran tersebut. Dari total lima target yang meliputi dua kajian strategis, satu Forum Diskusi Aktual (FDA), dan dua kajian aktual, hanya satu kajian aktual yang tidak terlaksana. “Cuma tiga bulan, Oktober November, kalau Desember *kan* nggak ada kegiatan, istilahnya sudah tutup buku,” katanya.

Kepala Subbidang Trantibum, Linmas dan Kawasan Pandu Harsono menyarankan, untuk mengklarifikasi data terkait dengan target dan capaian bisa memperolehnya di Bagian Perencanaan. “Di Bagian Perencanaan juga ada hasilnya,” katanya.

Namun melalui empat capaian tersebut, nyatanya Puslitbang Adwil dan Pemdes mampu menghasilkan rekomendasi yang mendapat disposisi dari Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti oleh komponen terkait.

Perihal kelanjutan dari disposisi tersebut, dirinya tidak tahu secara pasti. Sementara, pihaknya juga tidak berwenang untuk memaksa komponen menerapkan hasil kajian. “Tugas kita *kan* hanya mengkaji,” timpal Tomo Hadi Saputro salah satu peneliti Puslitbang Adwil Pemdes.

Jika berkenan ditindaklanjuti, puslitbang bersedia untuk diajak berkomunikasi membahas lebih dalam terkait muatan rekomendasi. Tomo mencontohkan, misalnya memberi rekomendasi ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil agar membuat UU Kartu Identitas Anak. Dinas yang bersangkutan membuat peraturan dapat bekerja sama dengan Biro Hukum Kemendagri. Hanya saja, saat pembahasan kontennya, bisa saja melibatkan Puslitbang.

Sementara pada tahun anggaran 2019, Agung telah merencanakan dua rekomendasi hasil Kelitbangan dengan rincian: satu kajian strategis bertema Kapasitas SDM Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat); satu kajian aktual dengan tema Kelembagaan dan Kewenangan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai amanat Permendagri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; serta tiga rekomendasi perumusan kebijakan hasil FDA, dengan tema, Penguatan Kapasitas Kelitbangan Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan; Optimalisasi Kinerja Damkar; serta Manajemen Bencana dan Kebakaran.

Untuk perkembangannya, saat ini Agung tengah menunggu persetujuan Kepala BPP terkait kajian strategis. Jika disetujui maka awal April 2019 pihaknya akan memulai kajian. Ia menyebutkan, jadwal tersebut terpaksa diambil, karena sebelumnya Puslitbang Adwil Pemdes mendapat revisi anggaran, sehingga memengaruhi jalannya kegiatan. “Hasil revisi baru keluar akhir Februari, makanya pada awal Maret diajukan ke Kepala BPP,” jelasnya.

■ MUJAENI

LANGKAH AKROBATIK MENCAPAI RENSTRA

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Puslitbang Pembangunan dan Keuda), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) Horas Mauritz Panjaitan menjelaskan, selama ini pihaknya selalu menjadikan Renstra sebagai acuan kerja lima tahunan. Namun ia tidak menampik, perubahan dan penyesuaian juga dilakukan guna merespons perkembangan yang ada. “Kalau kita sesuai Renstra, tidak boleh berbeda, cuma kita memang ada yang dimodifikasi,” kata Mauritz yang didampingi tiga kepala bidang, saat di temui *Media BPP* di ruangannya, Senin (4/3).

Mauritz menyebutkan, di dalam Renstra pihaknya memiliki dua sasaran target besar. Pertama, tersusunnya rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbang Puslitbang Pembangunan dan Keuda. Kedua, adanya rekomendasi dari hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan dan keuangan daerah. “Itu saja sebenarnya, hanya ada dua *outputs*,” tambahnya.

Meski demikian, Renstra yang ada dinilai masih mengatur arah kerja yang luas. Sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih rinci. Guna mempermudah kajian, dirinya telah menerjemahkannya ke dalam lima arah kebijakan, di antaranya, (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dalam rangka







percepatan pembangunan di berbagai bidang, (2) peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, memiliki integritas dan akuntabel, dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing daerah, (3) penyusunan regulasi yang berbasis *research* dan *evidence planning*, bersifat aplikatif dan rinci, (4) peningkatan efektivitas kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha/swasta dalam rangka percepatan pembangunan daerah, (5) terakhir, peningkatan tata kelola perizinan, penanaman modal dan kemudahan berusaha di daerah. Kelima arah tersebut menjadi acuan beberapa program yang telah dilakukan. Selain itu, Puslitbang Pembangunan dan Keuda juga telah menyusun 30 isu berdasar lima arah kebijakan tersebut yang akan menjadi bank isu untuk periode Renstra 2020-2024.

Proses penyusunan topik

Keberadaan topik kajian menjadi penting pada setiap tahunnya. Sebab melalui topiklah, kerja setiap puslitbang akan lebih terarah. Mauritz mengaku sebelum menentukan topik, terlebih dulu pihaknya menggelar diskusi ihwal penyusunan perencanaan yang dilakukan setiap akhir tahun sebelum-

nya. Wadah tersebut untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang sifatnya strategis, penelitian, atau Forum Diskusi Aktual (FDA), yang bakal dijalankan pada masing-masing bidang. Namun persetujuan susunan tersebut bergantung pada waktu ditetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Prinsipnya kami merencanakannya sejak awal, makanya pada awal Januari sudah mulai mengeksekusi semua kegiatan,” jelasnya.

Namun, jika saat penetapan DIPA didapati susunan rancangan tidak sesuai, maka akan dilakukan revisi yang biasanya dilakukan pada awal tahun. Meski dilakukan revisi, arah kegiatan Puslitbang Pembangunan dan Keuda tetap mengacu pada muatan Renstra. “Tetap merujuk pada apa yang sudah disusun dalam Renstra,” klaim Mauritz.

Selain itu, dalam menentukan topik pihaknya tidak merujuk pada topik yang sudah dikerjakan sebelumnya, tetapi lebih menekankan pada berbagai isu yang sedang berkembang.



Sekaligus melihat tren yang memberikan manfaat bagi komponen maupun masyarakat. Mauritz mencontohkan, persoalan energi yang pernah dilakukan pengkajian. Saat itu yang menjadi studi kasus adalah pemanfaatan listrik di Pekanbaru, yang terkendala akibat bencana alam. “Kami ambil persoalan itu, coba mari kita kaji mengenai PJU (Penerangan Jalan Umum), dan sudah menghasilkan kajian,” jelasnya.

Rencananya kajian mengenai penggunaan listrik juga dilanjutkan pada tahun ini. Keputusan itu diambil guna merespons kebijakan nasional mengenai pengurangan karbon emisi CO₂ yang dapat mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca.

Terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan Puslitbang Pembangunan dan Keuda dalam menjangkau berbagai topik kajian, sebenarnya Bagian Perencanaan BPP Kemendagri telah menawarkan berbagai topik yang disusun melalui matrik hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Program (Rakorsungram). Namun menurut Mauritz, matrik tersebut hanya satu dari sekian bahan pertimbangan yang ada. Sebab tidak sedikit daerah yang juga mengusulkan berbagai aspek untuk dikaji. Serta usulan dari berbagai pihak termasuk komponen. Namun pada intinya, pihaknya selalu menekankan keputusan pada skala prioritas. Dan meminta persetujuan kepada Kepala BPP Kemendagri. Dirinya juga menyebutkan jika hasil kelitbangannya sudah mengacu pada poin-poin yang diutarakan Rakorsungram, meski tidak sepenuhnya mutlak.

Hal ini diamini Kepala Bidang Ekonomi Daerah Herman Panggabean. Menurutnya, jika ada instruksi dari pusat yang berbeda dengan matrik Rakorsungram, maka posisi matrik menjadi lemah. “Maka muatan yang ada di dalam matrik bisa gugur (tidak dijalankan),” kata Herman.

“

**TETAP MENGACU
PADA FUNGSI DAN
TUGAS PUSLITBANG
PEMBANGUNAN DAN
KEUDA. DAN MENJADIKAN
KETERBATASAN ITU
SEBAGAI TANTANGAN
UNTUK MENGHASILKAN
REKOMENDASI YANG
BERKUALITAS**

“Kami tetap berpegang teguh, pada prinsip BPP, bagaimana melakukan penguatan peran dan fungsi BPP yang berorientasi, dengan mengoptimalkan fungsi penelitian dalam penyelenggaraan kelitbangan. Selain juga mewujudkan BPP sebagai *think tank* perumusan kebijakan pemerintahan,” tambah Mauritz.

Capaian dan sandungan

Menurut data yang ditunjukkan kepada *Media BPP*, selama kurun waktu 2018, Puslitbang Pembangunan dan Keuda telah menghasilkan 12 hasil penelitian yang diakui Mauritz sesuai dengan Renstra. 12 kajian tersebut telah mendapat disposisi Menteri Dalam Negeri, untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing komponen.

Selain itu, jika merujuk pada target administrasi hasil penelitian, hanya berupa laporan akhir, *executive summary*, dan rekomendasi. Namun, menurut **Kepala Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Fridrick Arnold** Parsaoran Simatupang, untuk kajian PJU yang dijalankan bidangnya, tidak hanya menghasilkan tiga aspek tersebut, tetapi juga ditambah susunan naskah akademik rancangan Permendagri.

Meski begitu, berbagai hasil rekomendasi belum sepenuhnya dijalankan. Ia mencontohkan rekomendasi hasil ka-

jian terkait perhubungan udara justru digunakan oleh kementerian/lembaga dan pemda. Belum diterapkan pada tataran komponen. Padahal dirinya sudah mengaitkan dengan komponen terkait. Fridrick menduga kondisi itu dipicu adanya batas-batas kepentingan tertentu, yakni menilai pihaknya mengambil tugas dari komponen. Padahal, posisi puslitbang mendampingi dalam pelaksanaan aturan dan pembinaan, agar sesuai dengan tugas komponen. Meski demikian ia menyadari pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memaksa komponen menjalankan rekomendasi hasil kajian. “Kalau bicara dugaan, bisa benar bisa tidak,” kata Fridrick.

Berbagai hasil kajian yang dilakukan bukan tanpa halangan. Mauritz mengaku dalam menjalankan kerjanya Puslitbang Pembangunan dan Keuda kerap dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Kondisi ini mengharuskan pihaknya untuk selalu berusaha mencari jalan keluar. Ia menjelaskan setiap tahun Puslitbang Pembangunan dan Keuda hanya mendapat anggaran Rp 2 miliar. Angka tersebut dibagi ke masing-masing bidang, dan urusan lainnya. Tiap bidang mendapat anggaran Rp 600 juta. Padahal jika mengacu indeks, satu penelitian membutuhkan Rp 200 juta. Dari angka tersebut, mestinya setiap bidang hanya mampu menghasilkan tiga penelitian. Kondisi itu terbalik dengan kenyataan pada 2018 yang mampu menghasilkan 12 hasil penelitian. “Berarti per bidang menghasilkan empat kajian, dengan uang hanya Rp 600 juta per bidang,” terangnya.

Selain itu, jika merujuk Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang mengatur 19 tahapan penelitian memberikan persoalan tersendiri. Pasaunya, beberapa proses tidak mungkin dilewati tanpa menghadirkan

narasumber. Namun sejauh ini relasi yang terbangun dengan beberapa pihak cukup membantu mengatasi persoalan tersebut. Sebab, melalui jaringan Puslitbang Pembangunan dan Keuda dapat menghadirkan beberapa narasumber yang dinilai kompeten di bidangnya. “Bagaimana jejaring kami dengan narasumber, itu sangat membantu sekali,” jelas Mauritz.

Ia melanjutkan, capaian yang dihasilkan membuktikan setiap bidang telah melakukan akrobatik dalam menjalankan kerjanya secara maksimal. Meski demikian dirinya tetap mengharapkan penambahan anggaran, agar mampu menjalankan kegiatan berdasarkan target yang disusun di dalam Renstra.

Kurangnya anggaran dirasa mengganggu jalannya kegiatan. Fridrick mencontohkan, kajian terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan perhubungan, yang mestinya mencakup ketiga jenis perhubungan, baik darat, laut, maupun udara dalam satu tahun. Namun karena terbatasnya anggaran, dirinya terpaksa memilih jalan alternatif dengan mengambil satu aspek kajian per tahun, yang kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Padahal idealnya hasil kajian sebagai produk ilmiah mestinya komprehensif, salah satunya tidak terlepas dari komponen pembiayaan.

Meski demikian, Fridrick meyakini jika langkahnya tetap mengacu pada fungsi dan tugas Puslitbang Pembangunan dan Keuda.

Dan menjadikan keterbatasan itu sebagai tantangan untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas. “Kami mencoba memberi masukan pada penyempurnaan UU No 23 Tahun 2014 pada beberapa pasal yang terkait, bagaimana fungsi pusat, kabupaten, provinsi, dan kota dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan perhubungan,” kata Fridrick.

■ MUJAENI



BERBENAH MENUJU KEMAJUAN

Program kelibangan yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum (Puslitbang Otda Polpum) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), diakui masih belum mencapai target Rencana Strategis (Renstra). Kondisi ini akibat minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya biaya, dan koordinasi yang belum berjalan baik. Hal itu diungkapkan Kepala Puslitbang Otda Polpum Syabnikmat Nizam saat ditemui *Media BPP*, Kamis (14/3).

Salah satu kegiatan yang disoroti adalah persoalan kajian. Ia menyebutkan tahun ini pihaknya hanya mendapat satu kajian strategis, yang ditempatkan di Bidang Politik. Kajian tersebut saat ini dalam proses persetujuan judul oleh Kepala BPP Kemendagri. Sedangkan dua bidang lain, seperti Bidang Otonomi Daerah, Bidang Pemerintahan Umum hanya mendapat kajian aktual. Padahal menurut Syabnikmat, minimal masing-masing bidang mestinya memiliki satu kajian strategis setiap tahunnya.

Minimnya anggaran, menurut Syabnikmat akibat pandangan terhadap peran BPP Kemendagri yang dinilai belum signifikan. Padahal BPP memiliki posisi strategis dalam memberikan kajian terhadap kinerja komponen Kemendagri. Namun, di lapangan terkadang komponen justru membuat kajian mandiri. Padahal langkah tersebut tidak perlu diambil, karena sudah menjadi tugas BPP Kemendagri. “Ha-

rusnya yang di sini bekerja, kok di sana juga mengerjakan,” terangnya.

Ia menjelaskan setiap tahun anggaran, dalam menentukan kajian pihaknya merujuk pada pagu anggaran. Jika mendapati pagu yang minim tentu kegiatan pun tidak banyak. Sementara untuk menentukan program topik kelibangan, ia mempertimbangkan

beberapa hal, seperti isu nasional, kajian berkelanjutan dari sebelumnya, dan arahan dari pimpinan. “Kalau ada isu-isu nasional itu perlu kita kaji,” katanya.

Selain itu kurangnya sinergi di internal BPP masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Ia menyebutkan, tahun sebelumnya Bagian Perencanaan



pernah menggelar kerja sama yang sebenarnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pihaknya. Namun Puslitbang Otda Polpum justru tidak dilibatkan. “Sinergisitas itu penting untuk mewujudkan capaian Renstra,” katanya.

Perlunya peningkatan SDM juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Politik Yohanes Sena. Ia mengatakan, peneliti merupakan ujung tombak program kelitbangan. Mestinya, peneliti didorong untuk mengembangkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai kegiatan. Selain itu, pemenuhan fasilitas juga perlu diper-

hatikan, seperti adanya ruangan khusus, literatur bacaan, dan perangkat lainnya. Kondisi itu diyakini mampu menunjang kerja-kerja peneliti dalam melahirkan banyak ide kajian.

Selain itu, menurut Sena untuk mencapai target Renstra perlunya peningkatan sosialisasi target setiap tahunnya ke seluruh aparaturnya puslitbang. Ia mengaku selama ini sosialisasi masih belum berjalan baik. Padahal kondisi ini berdampak pada tumpang tindihnya judul kajian karena dilakukan berulang-ulang. Ia berharap selanjutnya kondisi tersebut dapat diperbaiki. “Kalau seandainya perencanaan itu matang, dari awal itu tidak terjadi,” katanya.

Capaian kelitbangan

Selama berjalannya Renstra, beberapa capaian telah berhasil digapai. Misalnya, yang dilakukan Bidang Politik pada 2018. Pada tahun tersebut Bidang Politik melakukan dua kajian. Pertama, mengenai penilaian partai politik lewat kajian *Penilaian Kelayakan Partai*

Politik melalui Mekanisme Akreditasi. Kedua, kajian strategis terkait *Strategi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam Memperkuat Otonomi Khusus*.

Sena menyebutkan, dari kedua kajian tersebut melahirkan rekomendasi dan mendapat disposisi Mendagri untuk ditindaklanjuti ke komponen terkait. Ia menjelaskan, secara singkat isi rekomendasi penilaian partai politik, adalah dibentuknya lembaga khusus penilaian oleh pemerintah. Sena mencontohkan, kerja lembaga yang dimaksud nantinya hampir mirip Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang bertugas melakukan penilaian terhadap perguruan tinggi. Hanya saja objek penilaiannya adalah partai politik. Menurutnya hasil penilaian nantinya berguna menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. “Disarankan pemerintah membentuk lembaga khusus seperti BAN-PT untuk penilaian PT,” katanya.

Namun sayang untuk perkembangan lanjutan rekomendasi tersebut tidak diketahui secara pasti. Ia menyadari tidak semua hasil kajian diterapkan oleh komponen terkait. Di sisi lain pihaknya tidak berwenang untuk memaksa penerapan. Sebab, tugas puslitbang sekadar memberi masukan. “Ini hanya masukan saja, tidak mesti diterapkan,” katanya.

Sementara itu, menurut Syabnikmat guna mengawal hasil kajian, perlu digelar forum bersama komponen terkait. Singkatnya forum ini membahas respon ihwal rekomendasi kelitbangan yang telah diusulkan, agar kelanjutannya menjadi jelas. “Kita menyarankan, forum itu untuk menindaklanjuti hasil kajian,” lanjut Syabnikmat.



“

**SELAMA INI
SOSIALISASI MASIH
BELUM BERJALAN
BAIK. PADAHAL
KONDISI INI
BERDAMPAK PADA
TUMPANG TINDIHNYA
JUDUL KAJIAN
KARENA DILAKUKAN
BERULANG-ULANG**

■ MUJAENI

CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILU 2019 BEKAS TERPIDANA KORUPSI



- 1. Achmad Junaldi Sunardi**
DPRD Prov Lampung
Lampung 7/ No 4
- 2. Hamid Usman**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku Utara 3/ No 1
- 3. Desy Yuzandi**
DPRD Prov Banten
Banten 9/ No 4
- 4. Agus Mulyadi R**
DPRD Prov Banten
Banten 9/ No 5
- 5. Petrus Nauw**
DPRD Prov Papua Barat
Papua Barat 2/ No 12
- 6. Heri Baelanu, KA**
DPRD Kab Pandeglang
Pandeglang 1/ No 9
- 7. dede widarso**
DPRD Kab Pandeglang
Pandeglang 5/ No 8
- 8. Saiful T Iami**
DPRD Kab Tojo Una Una
Tojo Una Una 1/ No 12
- 9. Edy Muklison**
DPRD Kab Bitar
Bitar 4/ No 1
- 10. Christofel Wenatorel**
DPRD Kab Waropen
Waropen 1/ No 6

(10 calon)



- 1. Moh Taufik**
DPRD Prov DKI Jakarta
DKI 3/ No 1
- 2. Herry Jones, Johnny Koreh**
DPRD Prov Sulawesi Utara
Sulawesi Utara 1/ No 4
- 3. Husen Kusaha**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku utara 4/ No 2
- 4. Ferizal, SIP**
DPRD Kab Belitung Timur
Belitung Timur 1/ No 4
- 5. Mirhamuddin**
DPRD Kab Belitung Timur
Belitung Timur 2/ No 1
- 6. Al Hajar Syahyan**
DPRD Kab Tanggamus
Tanggamus 4/ No 1

(6 calon)



- 1. Muhlis**
DPRD Prov Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan 3/ No 8
- 2. Miska L. Nangka**
DPRD Prov Sulawesi Utara
Sulawesi Utara 2/ No 4
- 3. Ariel Arman**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku Utara 4/ No 1
- 4. Yohanes Martinus Kota**
DPRD Kab Ende
Ende 1/ No 1
- 5. Andi Mutamar Mututorang**
DPRD Kab Bulukumba
Bulukumba 3/ No 9
- 6. Zamri**
DPRD Kab Pasaman Barat
Pasaman barat 1/ No 6
- 7. Djeknon Amisi**
DPRD Kab Kepulauan Talaud
Kepulauan Talaud 3/ No 12

(7 calon)



- 1. Muhammad Aarif Ahmad**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku Utara 3/ No 4
- 2. Welhelms Tahalele**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku Utara 3/ No 2
- 3. Mudasir**
DPRD Prov Jawa Tengah
Jawa Tengah 4/ No 10
- 4. Akhmad Ibrahim**
DPRD Prov Maluku Utara
Maluku Utara 3/ No 5
- 5. HM Warsit**
DPRD Kab Bira
Bira 3/ No 1
- 6. Muh Nur hasan**
DPRD Kab Rembang
Rembang 4/ No 1
- 7. Rachmad Santoso**
DPRD Kab Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara 1/ No 1
- 8. Darje**
DPRD Kab Ogan Ilir
Ogan Ilir 4/ No 1
- 9. Andi Wabyudi Etang**
DPRD Kab Pinrang
Pinrang 1/ No 1
- 10. Hasmudin**
DPRD Kab Banjarnegara
Banjarnegara 5/ No 1
- 11. Bonar Zetisel Ambarita**
DPRD Kab Simalungun
Simalungun 4/ No 9

(11 calon)



- 1. Firdaus Djilani**
DPRD Prov Bengkulu
Bengkulu 5/ No 1
- 2. Jones Khan**
DPRD Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam 3/ No 1
- 3. Jhony Husbah**
DPRD Kota Cilegon
Kota Cilegon 1/ No 4
- 4. Syamsudin**
DPRD Kab Lombok Tengah
Lombok Tengah 5/ No 6
- 5. Darmawati Darso**
DPRD Kota Manado
Kota Manado 4/ No 10
- 6. Fari Wiyaz**
DPRD Kab Pesisir Barat
Pesisir Barat 2/ No 8
- 7. Inom Subandi**
DPRD Kab Ogan Komering Ilir
Ogan Komering Ilir 4/ No 6
- 8. Syamsudin Otik**
DPRD Kab Bontang
Mondowi Utara
Bontang Mondowi
Utara 1/ No 6
- 9. Rahmanudin**
DPRD Kab Luwu Utara
Luwu Utara 1/ No 7
- 10. Polman**
DPRD Kab Simalungun
Simalungun 4/ No 4

(10 calon)



- 1. Abner Reinal Jirnu**
DPRD Prov Papua Barat
Papua Barat 2/ No 12
- 2. Mat Muhizar**
DPRD Kab Pesisir Barat
Pesisir Barat 3/ No 2

(2 calon)



- 1. Ariston Moko**
DPRD Kab Nias Selatan
Nias Selatan 1/ No 3
- 2. Yulius Dakhi**
DPRD Kab Nias Selatan
Nias Selatan 1/ No 1

(2 calon)



- 1. Smuel Buntiang**
DPRD Prov Gorontalo
Gorontalo 6/ No 1
- 2. Zulri**
DPRD Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam 2/ No 1
- 3. Andi Gunawan**
DPRD Kab Lampung Timur
Lampung Timur 1/ No 1
- 4. Ramadhan Umasangaji**
DPRD Kota Pare Pare
Kota Pare Pare 1/ No 2

(4 calon)



- 1. Smuel Buntiang**
DPRD Prov Gorontalo
Gorontalo 6/ No 1
- 2. Zulri**
DPRD Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam 2/ No 1
- 3. Andi Gunawan**
DPRD Kab Lampung Timur
Lampung Timur 1/ No 1
- 4. Ramadhan Umasangaji**
DPRD Kota Pare Pare
Kota Pare Pare 1/ No 2

(4 calon)



- 1. Abdul Fatah**
DPRD Prov Jambi
Jambi 2/ No 1
- 2. Bonanza Kesuma**
DPRD Prov Lampung
Lampung 7/ No 7
- 3. Masri**
DPRD Kab Belitung Timur
Belitung Timur 1/ No 2
- 4. Muhammad Afrizal**
DPRD Kab Lingga
Lingga 3/ No 1
- 5. Bahri Syamsu Arief**
DPRD Kota Cilegon
Kota Cilegon 2/ No 1
- 6. Firdaus Obrini**
DPRD Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam 2/ No 9

(6 calon)



- 1. Mkasum DG Mannassa**
DPRD Kab Mamuju
Mamuju 2/ No 2
- 2. Muhammad Zen**
DPRD Kab Olu Timur
Olu Timur 1/ No 2

(2 calon)



- 1. Nasrullah Hamka**
DPRD Prov Jambi
Jambi 1/ No 10
- 2. Sahlan Sirad**
DPRD Prov Bengkulu
Bengkulu 6/ No 1
- 3. Syaifulhah**
DPRD Prov Kep Bangka Belitung
Kep Bangka Belitung 1/ No 1

(3 calon)



- 1. Usman Effendi**
DPRD Kab Pesisir
Pesisir 2/ No 8
- 2. Eli K Lemo**
DPRD Kab Morowali Utara
Morowali Utara 1/ No 5

(2 calon)



- 1. Emil Siban**
DPRD Kab Muar Banyuwangi
Muar Banyuwangi 4/ No 4
- 2. Ujang Hasan**
DPRD Kab Bengkulu Tengah
Bengkulu Tengah 1/ No 6
- 3. Rhommy Krishna**
DPRD Kota Lubuklinggau
Kota Lubuklinggau 3/ No 2

(3 calon)



DPD RI
(9 Calon)

- 1. Abdullah Puteh**
DPD Prov Aceh
No 21
- 2. Abdillah**
DPD Prov Sumatra
Utara No 39
- 3. Hamzah**
DPD Prov Bangka
Belitung No 35
- 4. Luzlanti**
DPD Prov Sumatra
Selatan No 41
- 5. Ririn Rosyana**
DPD Prov Kalimantan
Tengah No 41
- 6. La Ode Barion**
DPD Prov Sulawesi
Tenggara No 68
- 7. Mansyur Masie Abunawas**
DPD Prov Sulawesi Tenggara
No 69
- 8. A Yani Muluk**
DPD Prov Sulawesi Tenggara
No 67
- 10. Syachrial Kul Damopoli**
DPD Prov Sulawesi Utara
No 40

Jumlah Caleg yang
Berstatus Mantan
Tepidana Korupsi



DAERAH PEMILIHAN DENGAN JUMLAH PEMILIH TERBESAR DAN TERENDAH

- Dapil dengan jumlah dan partisipasi pemilih di atas rata-rata
- Dapil dengan jumlah pemilih di atas rata-rata, partisipasi di bawah rata-rata
- Dapil dengan jumlah pemilih di bawah rata-rata, partisipasi di atas rata-rata
- Dapil dengan jumlah pemilih di bawah rata-rata

Daerah Jumlah Pemilih Tertinggi



Daerah Jumlah Pemilih Terendah







SEORANG demonstran Palestina menggerakkan ban yang terbakar saat bentrokan dengan pasukan Israel di dekat pemukiman Beit El Yahudi, di Tepi Barat yang diduduki Israel. REUTERS/Mohamad Torokman/Editors Choice Pictures/www.reuters.com

UPT LITBANG BAPPEDA
KABUPATEN PEMALANG

MENUMBUHKAN FUNGSI *TECHNOPARK*

Tidak memiliki bangunan fisik technopark layaknya BPP Daerah lain, UPT Litbang Bappeda Kabupaten Pemalang justru menumbuhkan fungsinya. Edukasi, penyediaan sarana dan prasarana, hingga penggunaan teknologi tepat guna dihadirkan dalam mendukung pengembangan komoditas lokal. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

Bagi sebagian daerah, keberadaan *technopark* dianggap penting dalam mendukung penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). *Technopark* tersebut pada umumnya dikelola oleh badan yang menangani fungsi kelitbangan. Di beberapa daerah, *technopark* sengaja dibangun di atas lahan yang luas, Kawasan tersebut juga sebagai sarana untuk mendorong pengembangan komoditas lokal, inovasi, hingga proses penelitian. Namun kenyataannya, di beberapa daerah, banyak kawasan *technopark* tidak berfungsi. Infrastruktur yang dibangun dengan dana yang tidak sedikit dibiarkan seperti tidak terawat. Akhirnya gema *technopark* hanya sampai di telinga, sementara fungsinya tidak nyata (fatamorgana).

Di sisi lain, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) di daerah kerap mengeluhkan eksistensi lembaganya yang kurang mendapat perhatian, dan berdampak pada kualitas hasil-hasil kelitbangan yang masih jauh dari harapan. Pengembangan potensi lokal juga tidak maksimal. Keberadaan sumber

daya manusia dan minimnya anggaran menjadi alasan klasik yang selama ini membuat kebanyakan lembaga kelitbangan di daerah masih jalan di tempat.

Tidak mau sama dengan kebanyakan lembaga kelitbangan di daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Litbang Bappeda Kabupaten Pemalang berusaha mengubah *mindset* lembaga kelitbangan selama ini. Meski hanya setingkat UPT yang jauh lebih kecil dari Badan, UPT Litbang Kabupaten Pemalang memiliki segudang ide dan gagasan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat, dengan menumbuhkan fungsi *technopark*.

Menumbuhkan fungsi *technopark*

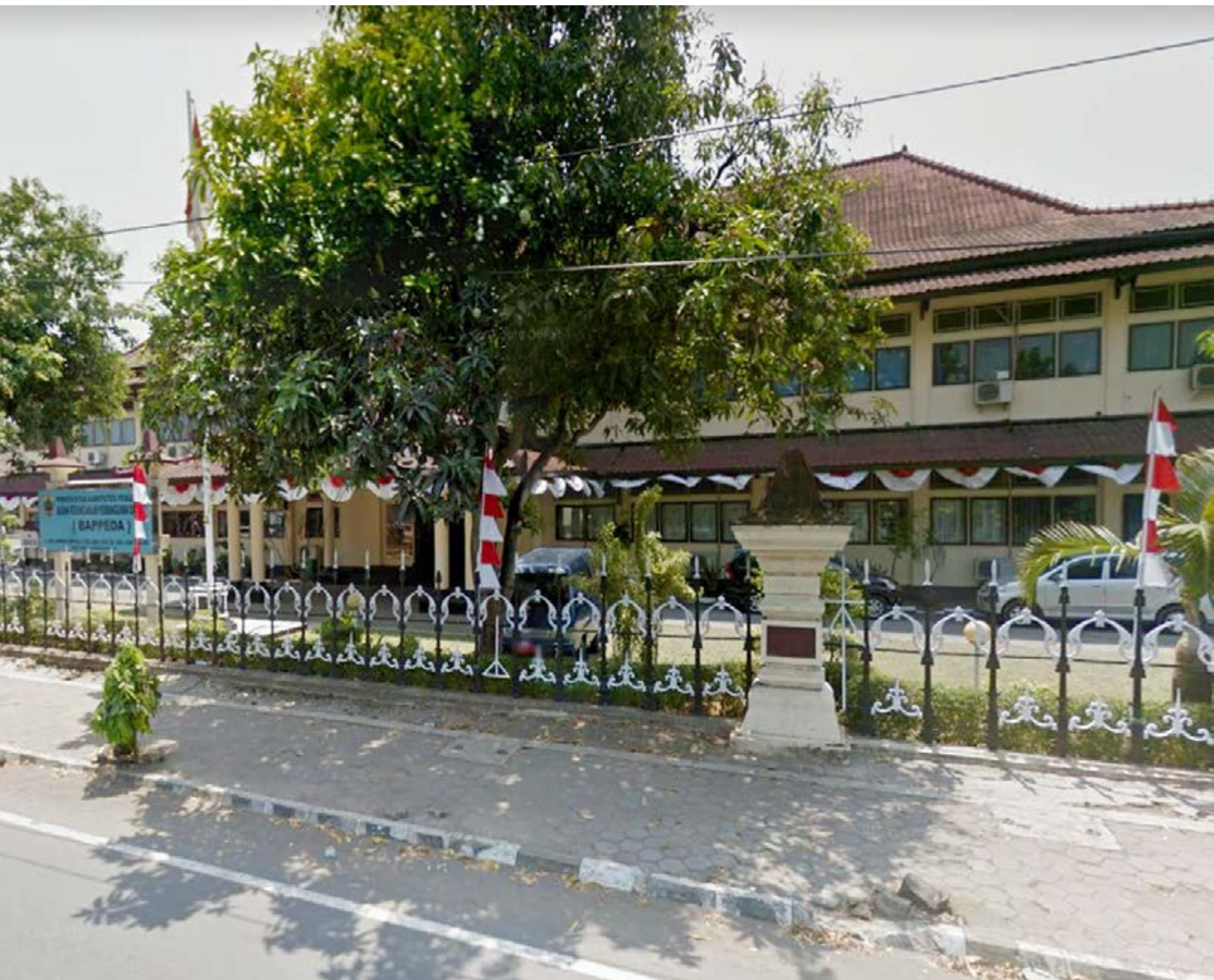
Meski belum memiliki bangunan fisik layaknya *technopark* seperti di beberapa daerah. Namun fungsi *technopark* mulai ditumbuhkan. Fungsi *technopark* seperti fungsi edukasi, penyediaan sarana dan prasarana, fungsi inkubator, pengembangan usaha kecil, serta penerapan teknologi tepat guna di beberapa kecamatan mulai diinven-



tarisasi.

“Gambaran orang tentang *technopark* itu kan bangunan. Tapi kami justru berbeda, kami tumbuhkan dulu fungsinya,” ucap Titien S Soebari Kepala UPT Litbang Kabupaten Pemalang, ketika Media BPP menemuinya di Bappeda Kabupaten Pemalang, akhir Februari 2019 lalu.

Keterbatasan sumber daya dan sum-



ber dana bukan masalah utama. Ketika menjabat sebagai Kepala UPT pada 2016, Titien giat membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Hingga saat ini tercatat ada 11 perguruan tinggi serta satu lembaga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian Dik-

ti yang membangun kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menurut Titien, fokus utama *technopark* di Kabupaten Pemalang adalah pertanian yang di dalamnya sudah termasuk perkebunan dan peternakan. Peralnya saat ini 56% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pemalang didukung dari sektor pertanian. Dengan begitu banyak yang bisa ditumbuhkan dari sektor pertanian da-

lam rangka pemberdayaan masyarakat.

Technopark menurut Titien tidak mesti pembangunan fisik di tanah yang luas. Pihaknya memanfaatkan berbagai bangunan milik pemerintah yang tidak terpakai di beberapa wilayah yang menjadi pusat pertanian. Bangunan-bangunan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, seperti dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan bersama petani, *workshop* pertanian,



pelatihan bisnis, cara memasarkan hasil pertanian, dan sebagainya.

Selain kerja sama dengan perguruan tinggi, UPT Litbang juga bekerja sama dengan beberapa SKPD yang melakukan kegiatan penelitian seperti Dinas Pertanian yang lebih intens mendorong potensi pertanian. UPT juga membangun kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menganalisis permasalahan-permasalahan daerah, sebagai dasar dan pijakan dalam merumuskan program.

Mengembalikan fungsi kelitbangan

Meski UPT Kelitbangan Kabupaten pemalang terbilang kecil, Titien dan Tim tidak mengesampingkan fungsi kelitbangan sebagai suatu hal yang penting bagi perencanaan pembangunan. Selama ini, menurutnya banyak perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dengan matang, pada implementasinya ternyata tidak fokus. Tidak sedikit perencanaan pembangunan yang tidak didasarkan pada kajian yang matang. “Perencanaan dan pembangunan harusnya *kan nyambung*. Sering kali ini tidak, karena tidak memikirkan beberapa hal seperti sumber daya manusia dan postur anggaran. Atau terkadang pimpinan menekankan kebijakan prioritas tetapi karena tidak didukung hasil kajian yang tidak valid, maka program tidak bisa dilaksanakan,” tutur wanita yang sedang menyelesaikan program doktoral yang kedua tersebut.

Padahal, Kabupaten pemalang memiliki target 27 prioritas hingga 2021 mendatang. Sementara, masih banyak yang belum tercapai. Pada 2016, UPT Litbang menjadikan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai program strategis. Dengan inovasi menurut Titien diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi penting, pasalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang berada di peringkat 34 dari 35 kabupaten/kota. Satu tingkat di atas Kabupaten Brebes.



Selain IPM rendah, data BPS menyebutkan indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masih juga rendah. Dalam hal pendidikan, misalnya, rata-rata lama sekolah masyarakat Pemalang berada di angka 6,3. “Artinya penduduk yang berusia 25 tahun ke atas hanya lulusan Sekolah Dasar. Kemudian daya beli masyarakat hanya Rp 7.758.000/tahun. Jika dibagi 12 bulan artinya kemampuan *purchasing power* penduduk hanya sekira Rp 600 ribu/bulan,” terang Titien.

Dari data BPS tersebut, UPT kemudian menemukan beberapa permasalahan seperti potensi sumber daya alam yang kurang dimaksimalkan. Contohnya potensi nanas yang begitu besar tidak cukup menambah sumber pendapatan, potensi mangga istana yang melimpah justru malah di-*branding* oleh Probolinggo. Selain nanas dan



mangga, Kabupaten Pemalang juga memiliki potensi lain seperti kerbau lokal, kopi arabika, dan bunga melati yang tidak kalah potensial tetapi belum cukup dikenal.

Kerja sama kelitbangan

Menurut Titien, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dengan masalah yang kompleks, sementara ang-



garan tidak banyak, perlu dilakukan kerja sama dan kolaborasi dengan sistem *quintuple helix* yaitu kolaborasi dan sinergitas antara akademik, bisnis, pemerintah, dan masyarakat dengan menyoroti fungsi *technopark*.

Dari beberapa kerja sama yang dilakukan dengan perguruan tinggi dan BPPT, diinventarisasi beberapa rencana aksi berdasarkan hasil-hasil kajian seperti

pengembangan desa potensial menjadi desa inovatif. UPT memetakan daerah mana saja yang bisa ditanami komoditas utama seperti nanas dan mangga.

“Dinas Pertanian setiap tahun memperluas wilayah penanaman nanas sekira 10 hektare. Sebelum membuka lahan, mereka harus berkoordinasi dengan UPT Litbang. Nantinya mereka akan mendapat peta daerah mana saja yang boleh ditanami. Untuk nanas, misalnya, tidak boleh menanam di luar daerah Belik dan Pulosari. Begitu juga dengan mangga, hasil penelitian Universitas Soedirman, misalnya, menemukan perbedaan struktur tanah di daerah tertentu yang tidak cocok ditanami. Lalu agar bisa ditanami mangga, mereka sediakan fosfor dan *treatment* untuk pembibitannya,” tegas Titien.

Kerja sama yang dibangun memberikan manfaat tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk pihak universitas. Pihak kampus memiliki kepentingan sebagai fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebaliknya pemerintah juga terbantu di tengah minimnya anggaran yang dimiliki. Pihak kampus memiliki mitra seperti Kemenristek dan Dikti, Kemendes, dan beberapa sumber pendanaan, termasuk dalam hal penyediaan teknologi tepat guna.

Belum lama ini UPT Litbang membangun komitmen dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam program *IPB Goes to Field*. Kegiatan tersebut adalah program pemerintah dan IPB dalam menyoroti rakyat kecil. Salah satu poin kesepakatannya adalah IPB akan menempatkan mahasiswa dan dosen di setiap rumah warga. Nantinya mereka akan melakukan penelitian terkait potensi pengembangan kerbau Pemalang.

“Selain dalam program KKN tematik, nantinya juga setiap satu orang sarjana akan membina satu petani, mereka akan memberikan pemahaman mengenai peternakan yang baik, pakan ternak yang baik, dan lain-lain. Mereka akan melakukan penelitian di sini,” ucap wanita yang pernah studi doctoral di Australia ini.

Tidak hanya dengan pihak kampus, kolaborasi dengan SKPD juga kian intensif. Berdasarkan hasil penelitian UPT Litbang, selama ini tidak jalannya kolaborasi antar-SKPD disebabkan oleh dua faktor, yaitu lemahnya sumber daya manusia dan komitmen antar SKPD. Untuk itu, kolaborasi dengan SKPD akan terus dibangun khususnya untuk menyukseskan program SIDA.

Salah satu kerja sama yang digarap tidak hanya terkait pengembangan sektor unggulan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam hal kegiatan kelitbangan. Selama ini kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pemalang dilakukan di masing-masing SKPD termasuk Bappeda. Penelitian mereka umumnya dilakukan oleh pihak ketiga karena minimnya peneliti. Selain itu, kerap kali penelitian tidak berdasarkan kebutuhan pemerintah karena tidak merujuk pada RPJMD.

“Pada masa mendatang, kegiatan kelitbangan diharapkan bisa dilakukan di UPT Litbang. Karena program penelitian yang dilaksanakan di UPT Litbang tidak akan lepas dari RPJMD. Selain itu, karena belum ada peneliti, tenaga ahli juga kita pilih yang kompeten, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh SKPD,” tegas Titien.

Dengan proses kajian yang benar, diharapkan hasil-hasil kajian bisa menjawab isu strategis, komprehensif, dan valid. Sehingga pelaksanaan kebijakan bisa tepat guna dan menjawab permasalahan daerah. Dengan begitu, proses penelitian tidak sekadar menghabiskan anggaran yang besar, tetapi kualitasnya di bawah standar.

Dari beberapa program di atas, UPT Litbang ternyata tidak melulu bertugas menjadi pengepul hasil-hasil kajian dari berbagai SKPD yang selama ini dianggap menjadi tugas utama, tetapi memiliki fungsi lebih besar. Ini bisa menjadi contoh bagi BPP Daerah yang selalu mengeluh tidak memiliki anggaran, padahal permasalahan daerahnya lebih besar dari sekadar Kabupaten Pemalang.

■ SAIDI RIFKY

Pemalang, Jawa Tengah

Tidak Lagi Menjadi Daerah Persinggahan

Kabupaten Pemalang bukanlah destinasi utama wisatawan. Ia hanya daerah persinggahan pengunjung yang hendak ke berbagai daerah di pulau Jawa. Karena bukan merupakan daerah tujuan, Pemalang terkesan jauh dari perhatian. Indeks pembangunan manusia Kabupaten Pemalang berada di peringkat kedua dari bawah dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Belakangan, Pemalang seperti mulai berbenah, beberapa potensi unggulan mulai dibangkitkan. Nanas madu mulai menjadi branding utama yang tidak hanya dijual dari produksinya tetapi juga kawasan pertaniannya yang menjadi daya tarik wisatawan. Tidak hanya itu, ragam kuliner yang unik dan menarik yang tidak kalah dari kuliner di daerah lain, mulai dikenal luas karena cita rasa khasnya. Pemalang bukan lagi daerah persinggahan, tetapi juga bisa menjadi daerah tujuan untuk memanjakan diri dan bersenang-senang.



Siang itu udara pemalang cukup panas. Maklum, waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB. Di tengah cuaca terik siang itu, *Media BPP* pada Februari 2019 lalu bersama beberapa staf Bappeda Kabupaten Malang mengunjungi sentra pengolahan nanas di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa

Tengah. Sebuah sentra pertanian penghasil nanas madu yang terkenal itu.

Toyota bertipe MPV menemani kami selama perjalanan menuju Belik. Dibutuhkan waktu sekira 1 jam untuk menuju ke sana. Keluar dari pusat kota, mobil yang kami tumpangi terus menuju arah selatan menyusuri Jalan Pemalang-Purbalingga. Memasuki jalan tersebut, udara mulai se-

juk. Sepanjang jalannya menyuguhkan panorama unik yang terasa baru dari pandangan mata. Persawahan, pegunungan hingga suguhan pohon jati yang tengah meranggas, menjadi fenomena yang menemani perjalanan.

Kecamatan Belik menjadi salah satu daerah penghasil komoditas tanaman hortikultura di Kabupaten Pemalang. Tanaman tersebut saat ini menjadi pent-



ing dan strategis untuk dikembangkan di Pemalang, pasalnya berperan besar dalam mendorong perekonomian masyarakat. Mengunjungi Belik, khususnya ketika memasuki Desa Beluk, nanas bisa ditemukan dengan mudah di kanan dan kiri jalan. Baik nanas hasil panen yang dijual maupun hamparan kebun nanas yang memenuhi bukit sejauh mata memandang.

Bersama Agus Haryanto dari Unit Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Pemalang, *Media BPP* mengunjungi sentra pengolahan nanas madu Pemalang di Desa Beluk, Kecamatan Belik. Menurut Agus nanas Pemalang khususnya yang berada di Desa Beluk berbeda dengan nanas madu daerah lain. Nanas madu dari Belik mengandung rasa madu alami. Selain itu juga lebih unggul karena memiliki sedikit kandungan air.

“Nanas madu di Belik adalah nanas dengan kualitas A. Karena kalau ditanam di daerah lain meski masih di wilayah Pemalang, akan sangat berbeda rasanya. Biasanya agak sedikit asam. Dengan kualitas A tersebut, kita juga bisa mendapatkannya dengan harga murah. Jika di Jakarta harganya Rp 15 ribu dengan kualitas C, di sini hanya Rp 5 ribu dengan kualitas terbaik,” ujarnya.

Media BPP juga diajak mengunjungi salah satu sentra pengolahan nanas yang dikelola oleh seorang perempuan bernama Jariyah. Ia merintis usaha pengolahan makanan berbahan dasar nanas. Melalui kelompok usaha Tiga Sekawan, Jariyah memberikan merk Cita Rasa untuk setiap produknya.

Tempat usaha atau kios Jariyah tidak terlalu besar, berada tepat di samping rumahnya. Tempat pengolahan nanas berada di samping kios yang memanjang ke belakang. Kami berkesempatan melihat proses pembuatan dodol nanas dan manisan nanas. Saat ini terdapat kurang lebih 10 orang pekerja

yang membantu Jariyah memproduksi berbagai olahan nanas.

Di kios tempat berbagai produk olahan nanas dipajang, Jariyah menceritakan awal mula dibentuknya kelompok usaha Tiga Sekawan yang dipimpinnya saat ini. Menurut Jariyah usahanya dimulai pada 2006, ketika nanas saat itu sangat melimpah. Pada 2016, produksi nanas di Kecamatan Belik mencapai puluhan ribu ton/tahun. Namun, nanas yang ada hanya dijual di pinggir jalan. Kekhawatiran Jariyah semakin kuat ketika nanas Pemalang yang dibawa ke Jakarta tidak laku.

“Kadang bawa dari sini satu truk ke Jakarta, pulangnyanya tidak bawa uang. Karena nanas dijual murah. Orang-orang menganggap kalo nanas ini terlalu kecil, sementara banyak nanas dari daerah lain besar-besar. Selain itu, mereka belum banyak yang tahu kalau ini berbeda, artinya lebih manis dan bagus,” ceritanya.

Jariyah kadang kala merasa sedih. Nanas saat itu juga tidak terlalu membuat para petani sejahtera meski nanas sa-

ngat melimpah. Untuk menambah penghasilan, ia kemudian berinisiatif membuat manisan nanas. Tetapi, penjualan manisan nanas diakui Jariyah juga sangat susah. Padahal harganya cukup murah yaitu hanya Rp 40 ribu/kg.

Bak gayung bersambut, akhirnya beberapa tahun kemudian ada inisiatif pemerintah untuk membantu mengembangkan olahan nanas. Melalui kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah membuat program pelatihan berbagai makanan yang berbahan dasar nanas. Pemerintah juga mendorong pembentukan kelompok usaha. Nantinya mereka akan dibantu dari sisi permodalan dan pemasaran. Kesempatan tersebut dimanfaatkan betul oleh Jariyah, untuk memperkaya keterampilan olahan nanas.

“Di Kecamatan Belik awalnya dibentuk 5 kelompok usaha, beberapa bulan kemudian hanya berjalan 2 kelompok usaha. Terakhir tinggal 1 kelompok usaha. 1 Kelompok usaha itu adalah kelompok usaha yang terdiri dari 5 orang pengusaha. Itu pun yang jalan sampai saat ini tinggal 3 orang di antaranya saya di sini,” terang Jariyah.





Olehnya nanas madu pun saat ini diolah menjadi berbagai makanan menarik, sekaligus menjadi oleh-oleh wisatawan ketika berkunjung ke Pemalang. Di antaranya manisan nanas, keripik nanas, dodol nanas, dan stik nanas. Kelompok lain juga mengembangkan olahan lain seperti sirup nanas, wajik nanas, kerupuk nanas dan lain-lain.

Kecamatan Belik saat ini juga menjadi destinasi tujuan wisata. Selain tempatnya yang sejuk dan kawasan pertanian. Sentra olahan nanas menjadi daya tarik wisatawan yang ingin mengetahui proses pembuatan berbagai olahan nanas, atau memetik langsung nanas dari pohonnya. Pemerintah di wilayah tersebut juga tengah mendorong pengembangan wisata alam seperti air terjun dan dataran tinggi.

“Di daerah ini nantinya juga akan dibangun *technopark*, untuk membantu para petani nanas dan petani lainnya, dari mulai pelatihan dan pembinaan kepada para petani,” kata Agus.

Dengan begitu Jariyah tidak khawatir lagi ketika produksi nanas cukup melimpah, bahkan ketika pemerintah Kabupaten Pemalang menambah wilayah penanaman nanas hingga 10 hektare setiap tahun. Ia berharap pemerintah bisa terus mendorong kesejahteraan para petani nanas, serta berharap pengembangan produksi olahan nanas semakin dikenal masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat lokal,

namun juga ke manca negara.

Pecak welut Hj Mut

Tidak hanya dikenal sebagai penghasil nanas madu, Pemalang juga punya kuliner andalan selain nasi grombyang. Adalah kuliner pecak welut yang berada di Jl. Raya Tegal Mlati. Di hari kedua, *Media BPP* berkesempatan mencicipi kuliner yang berada di Kecamatan Petarukan tersebut. Di sepanjang jalan itu, sejumlah warung makan menyajikan kuliner yang berbahan dasar belut tersebut.

Oleh staf yang bekerja di Bappeda Kabupaten Pemalang, kami diajak mencoba pecak welut Hj Mut. “Saya sudah beberapa kali datang ke sini. Pokoknya di sini beda dengan yang lain,” ucap Ova Maerakaca salah satu staf yang berasal dari Bappeda.

Resep belut yang disajikan sebenarnya sederhana saja. Belut yang sudah digoreng disajikan di atas cobek. Yang berbeda adalah belut tersebut diguyur santan dengan campuran kelapa lengkap dengan rempah-rempah khas warung Hj Mut. “Resep pecak belut ini saya peroleh dari keluarga saya. Ini resep turun-temurun,” ujar Hj. Mut.

Menurutnya olahan pecak welut miliknya berbeda dengan pecak welut pada umumnya. Belut yang ia sajikan adalah belut yang masih segar, semua yang diolah juga dadakan ketika ada pesanan termasuk sayur rebus yang disajikan terpisah. Itu kenapa pengun-

jung cukup memaklumi ketika penyajiannya memakan waktu lama.

Namun soal rasa tidak diragukan, lama menunggu penyajian tak lagi jadi soal. Rasa pedas kuah santan yang pas serta gurihnya belut goreng membuat kami ketagihan. Daging belut yang gurih terasa lebih kian lezat ketika disantap dengan sepiring nasi hangat. Daging belutnya empuk dan mudah dilepaskan dari durinya. Rasa gurih belut dan kuah berpadu dengan nuansa hijau pesawahan di sekitarnya.

Kelezatan pecak welut Hj Mut membuat warungnya dikenal dan menjadi favorit para pegawai pemerintah Kabupaten Pemalang. Meski terbilang baru jika dibanding warung pecak welut yang lain, warung yang berdiri sejak 1998 ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan kadang ada saja orang yang sengaja datang dari luar kota mampir ke tempatnya untuk sekadar menikmati pecak welutnya.

Dari cerita komoditas tanaman dan kuliner unggulan di atas, menjadi bukti kekayaan potensi daerah yang bisa dikembangkan untuk menarik pengunjung ke Pemalang, meski Pemalang merupakan daerah persinggahan. Dengan ragam keunikan tersebut, diharapkan di masa mendatang Kabupaten Pemalang bisa menjadi destinasi tujuan para pelancong dari berbagai sudut negeri. Sekaligus pusat destinasi di Jawa Tengah seperti selogannya “*Pusere Jawa*”.

■ SAIDI RIFKY

CARUNIA MULYA FIRDAUSY,
PROFESOR RISET BIDANG EKONOMI LIPI

TEMUKAN KONSEP AKURAT MENGUKUR GARIS KEMISKINAN MULTI DIMENSI

Berawal dari pengerjaan tugas akhir sewaktu menempuh gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor, yang mengkaji persoalan nelayan di daerah transmigrasi Papua, membawa Carunia Mulya Firdausy, Profesor Riset Bidang Ekonomi LIPI lebih menyukai dunia penelitian. Menjadi peneliti, terutama di Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK), menurutnya memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak, karena tidak terkekang beragam aturan birokrasi. Jalan itu yang menjadi pilihan hidup Carunia untuk terus tumbuh menyebarkan keilmuannya.

Sadar untuk menjadi peneliti membutuhkan jenjang pendidikan yang tinggi, laki-laki kelahiran Jakarta 30 Desember 1957 ini, kemudian melanjutkan pendidikannya ke program magister ekonomi pembangunan di Australian National University Canberra, magister ilmu ekonomi di University of New Castle, dan program doktor ilmu ekonomi di University Queensland Australia.

Bidang ekonomi sebenarnya tidak selaras dengan keilmuan yang diambil Carunia saat menempuh gelar sarjana, yang fokus di pertanian dan perikanan. Namun, pilihan itu diambil, karena melihat bidang ekonomi memiliki banyak persoalan dan nyaris diperlukan di segala bidang. “Dengan membaca, mengamati, dan seterusnya, saya tertarik dengan ilmu ekonomi, kemudian S2 saya fokus ke ilmu ekonomi, dan S3 juga saya fokus ilmu ekonomi, ilmu perikanan sendiri saya tinggalkan,” katanya saat dihubungi *Media BPP*, Jumat (15/3).

Banting setir ke kajian ilmu ekonomi, nyatanya berbuah manis. Terbukti berbagai capaian telah berhasil ditorehkan Carunia dengan bekal keilmuannya. Salah satunya dinobatkan sebagai profesor riset di bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) sejak 2003. Berbagai hasil kajiannya pun telah dipublikasikan di kancah nasional maupun internasional terindeks Scopus, baik dalam jurnal ataupun



Tempat Tanggal Lahir :

Jakarta, 30 Desember 1957

Jabatan :

Professor Riset bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara

Pendidikan :

Institut Pertanian Bogor 1981

Australian National University Canberra, Australia 1986

New Castle University Australia 1987

Queensland University, St.Lucia, Brisbane-Australia 1992

yang dibukukan oleh beberapa penerbit termasuk LIPI Press.

Garis kemiskinan multi dimensi

Ayah tiga anak ini menyebutkan, saat ini hasil kajiannya pada 2013 mengenai konsep dan pengukuran garis kemiskinan multi dimensi tengah diproses untuk diterbitkan LIPI Press. Sebelumnya, hasil kajian tersebut telah diterbitkan oleh beberapa penerbit lainnya.

Persoalan pengukuran garis kemiskinan menjadi isu penting untuk dikaji. Sebab, saat ini pemerintah masih menggunakan alat ukur Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih menekankan pada pengeluaran per kapita perbulan. Indikator tersebut dinilai memiliki berbagai kelemahan, misalnya pengukuran kalori sebagai acuan kemiskinan yang disamaratakan antara anak-anak dengan orang dewasa. Padahal kebutuhan keduanya berbeda.

“Sekarang itu pengukuran garis kemiskinan untuk anak kecil, orang dewasa, laki-laki, dan perempuan dinilainya sama,” kata Carunia yang juga Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara tersebut.

Kondisi itu berdampak pada kelirunya penghitungan angka kemiskinan di Indonesia yang terlihat rendah. Akibatnya kebijakan dalam mengurangi kemiskinan menjadi kurang tepat, karena data yang dikantongi belum akurat. “Karena garis kemiskinan yang ditetapkan rendah, hasilnya data yang tidak sesuai,” tambahnya.

Penelitiannya menyimpulkan alat ukur garis kemiskinan perlu diperbarui dengan mengacu berbagai dimensi. Carunia merumuskannya ke dalam beberapa aspek, seperti peningkatan pemberdayaan, kapabilitas, peluang, dan keamanan. Dengan pengukuran multi dimensi dinilai bakal mendapatkan data yang akurat, sehingga mempermudah pemerintah memetakan penyusunan program dalam mengatasi kemiskinan sampai ke akar persoalan.

Selain itu pembangunan ekonomi juga berorientasi pada semangat membangun kualitas masyarakat. Karena untuk memberantas kemiskinan adalah dengan membuat masyarakat berdaya. Berbeda dengan alat ukur saat ini yang hanya berusaha mengondisikan masyarakat agar tidak berada di bawah garis kemiskinan.

Suami dari Helena Firdausy ini menyebutkan, untuk menemukan hasil penelitian yang akurat dirinya melakukan kajian di hampir seluruh daerah di Indonesia dalam rentang waktu tiga tahun. “*Kan* perlu banyak daerah untuk menjustifikasi pentingnya garis kemiskinan multi dimensi,” katanya.

Gayung bersambut

Ia menyebutkan hasil kajiannya direspons Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menggelar diskusi serial untuk menyusun strategi dalam menetapkan garis kemiskinan multi dimensi pada 2013. Terakhir 2018 kembali diseminarkan oleh Forum Masyarakat Statistik. Sampai saat ini proses penerapan rekomendasi tersebut masih terus berjalan. Dirinya mengakui tidak mudah untuk menerapkan garis kemiskinan multi dimensi karena nilainya yang besar, dan ujungnya membuat temuan angka kemiskinan meningkat. “Kalau itu dihitung jelek sekali potret kemiskinan Indonesia, itu bahaya bagi investasi asing karena nilainya tidak aman, kualitas tenaga kerjanya rendah, akibatnya investor tidak masuk,” katanya.

Meski demikian, penerapan garis kemiskinan multi dimensi tetap menjadi penting. Karena melalui data itulah akan menjadi acuan berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Ia menuturkan, selama ini perhatian pemerintah terhadap hasil penelitian masih kurang. Besar harapannya agar hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan. “Tidak ada dasar penelitian, tetapi sudah menentukan kebijakan, hasilnya *kan* bakal salah,” pungkasnya.

Peneliti K/L harus perhatikan pendidikan

Kiprah Carunia sebagai peneliti LIPI bisa menjadi contoh baik bagi para peneliti yang ada di Kementerian dan Lembaga, tidak terkecuali BPP Kemendagri. Untuk memiliki kemampuan mumpuni, Carunia juga berpesan kepada para peneliti di Kementerian Dalam Negeri untuk memerhatikan pendidikan. Ia berpesan peneliti Kemendagri baik yang ada di pusat dan daerah, bisa meningkatkan jenjang pendidikannya. Sebab seorang peneliti tidak bisa berhenti pada jenjang magister melainkan juga perlu ke tingkat doktor.

Dengan demikian dapat membentuk pandangan kritis terhadap berbagai fenomena yang terjadi, sehingga merefleksikan hasil penelitian yang baik bagi kemanfaatan masyarakat. Selain itu, perlu juga fokus penelitian yang dilakukan Kemendagri lebih membedah persoalan Kemendagri. “Bagaimana mendorong otonomi daerah, desentralisasi ini betul-betul bisa terealisasi bagi kemanfaatan di daerah,” katanya.

Terakhir, karena lingkup Kemendagri yang luas maka perlunya peneliti BPP membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk badan litbang lainnya. “Tugas Kemendagri sangat luas, mulai dari desa sampai tingkat nasional, saya kira perlu juga kerja sama dengan litbang lain supaya saling mengisi,” pungkasnya.



PENERAPAN GARIS KEMISKINAN MULTI DIMENSI TETAP MENJADI PENTING. KARENA MELALUI DATA ITULAH AKAN MENJADI ACUAN BERBAGAI KEBIJAKAN DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Pengidap Obesitas Wajib Waspada Penyakit Jantung

Orang dengan kondisi obesitas kerap dikaitkan dengan ancaman penyakit jantung. Meski perdebatan mengenai potensi metabolisme yang dimiliki pengidap obesitas terhadap penyakit tidak menular tersebut masih berlanjut.

Sindrom metabolisme sendiri merupakan jenis penyakit yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, berat tubuh meningkat, diikuti naiknya kolestrol secara tiba-tiba dan terjadi hampir bersamaan. Baru-baru ini penelitian yang dilakukan oleh Chaffin dkk, pakar kesehatan dari sekolah kesehatan Wake Forest, Amerika Serikat menerbitkan artikel, berjudul *Metabolically Healthy Obesity, Transition to Metabolic Syndrome and Cardiovascular Risk*. Chaffin dkk mengkaji potensi metabolisme yang dimiliki pengidap obesitas, terhadap sindrom metabolisme sebagai acuan risiko penyakit jantung.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *American College Of Cardiology* (2018) ini, melibatkan 6809 responden dari situs Studi Multi-Etnis Aterosklerosis (MESA). Metode yang digunakan yaitu *cox propotional hazard*, dan model regresi logistik untuk melihat hubungan antara obesitas ($\geq 30 \text{ kg/m}^2$) dan sindrom metabolisme, dengan mengomparasikan definisi konsensus federasi diabetes internasional, penyakit jantung dan mortalitas rata-rata 12,2 tahun. "Kami menguji untuk interaksi dan analisis sensitivitas yang dilakukan untuk sejumlah kondisi," tulis Chaffin dalam penelitiannya.

Penelitian berangkat dari pemahaman, metabolisme yang dimiliki pengidap obesitas bersifat sementara, dan transisi ke sindrom metabolisme memiliki beragam gejala agar sampai pada penyakit jantung. Hasilnya, dibanding dengan berat badan normal yang sehat secara metabolisme, awalnya tidak berhubungan secara berarti terhadap serangan penyakit jantung. Namun hampir setengah dari responden, sindrom metabolismenya berkembang. Kondisi ini menunjukkan metabolisme obesitas tidak stabil. Akibatnya, kemungkinan terserang penyakit jantung meningkat. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan responden yang memiliki metabolisme obesitas yang stabil, atau berat badan sehat.

Penelitian ini menyimpulkan, metabolisme obesitas tidak bisa digunakan untuk bahan prediksi risiko masa depan kesehatan seseorang. Terutama acuan untuk menyatakan ancaman risiko penyakit jantung. Namun, guna menghindari kondisi lebih lanjut, orang dengan obesitas dianjurkan mengurangi berat tubuhnya. "Orang obesitas sebaiknya mengurangi berat badan dan mengubah pola hidup untuk mengurangi risiko penyakit jantung," tulis Chaffin dalam penelitian tersebut.

Fakta obesitas

Penelitian Chaffin dkk merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian terkait bahaya obesitas dan risiko kelebihan berat badan. Penyakit ini menjadi pekerjaan rumah bagi dunia medis. Mengutip *kompas.com*, berdasarkan presentasi "the 2018 Congress on Obesity di Vienna", Austria, menunjukkan jika pada 2045 hampir 22 persen penduduk dunia diperkirakan akan mengalami obesitas.

Kondisi obesitas di Indonesia sendiri pada 2017 juga menunjukkan angka yang signifikan. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan Kementerian Kesehatan, sekira 25,8 persen penduduk dewasa tergolong kategori obesitas. Jumlah itu melonjak, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya menyentuh angka 10,6 persen.

Melihat hasil kajian Chaffin dkk bisa menjadi referensi bagi perkembangan ilmu kesehatan saat ini, sekaligus menjadi catatan serius bagi orang dengan obesitas agar memperbaiki faktor yang mendukung terjadinya kegemukan, seperti memperbaiki pola makan dan meningkatkan aktivitas olahraga. Tindakan itu perlu jika ingin terhindar sejak dini dari penyakit sindrom metabolisme, dan jantung yang dapat berujung pada kematian.

■ MUJAENI

MENGHEMAT PENGGUNAAN BBM DENGAN ALAT MAGNETIK

Berbagai cara bisa dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Mengingat sumber daya tersebut bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Cara itu di antaranya melalui berbagai penerapan inovasi, seperti mengembangkan moda transportasi berbahan gas maupun listrik. Selain mengembangkan moda transportasi non BBM, menjaga ketersediaan sumber daya yang berasal dari timbunan fosil makhluk purba tersebut, juga bisa dilakukan dengan mendorong penghematan, pada pengguna moda transportasi berbahan bakar minyak.

Penelitian terbaru, yang dilakukan Kali Prasad Kar seorang mahasiswa Fakultas Teknik Chandigarh Group of Colleges, Jhanjeri, India, menyatakan bahwa untuk menghemat penggunaan BBM bisa dilakukan dengan memasang magnet permanen *neodymium boron* besi. Magnet tersebut di letakan di ujung saluran bahan bakar sebelum masuk ruang pembakaran atau sering disebut karburator. Magnet jenis ini dipilih karena memiliki kekuatan besar, dengan intensitas fluks 5000 *gauss*. Umumnya magnet tersebut digunakan pada mesin lemari pendingin, speaker, mikrofon, dan instrumen elektronik lainnya. Hasil penelitian ini telah diterbitkan *International Journal of Engineering Design & Analysis* pada 2018, dengan judul *Magnetic Fuel Saver A modified Tool*.

Dengan kekuatan yang dimiliki, bahan bakar yang melewati titik magnet akan terpolarisasi menjadi unsur komponen dasar, sebelum akhirnya masuk ke karburator. Meski diletakan dekat karburator, penempatan magnet juga perlu diperhatikan. Sebab, magnet harus memiliki suhu *curie* yang cukup tinggi agar dapat mempertahankan karakteristik magnetiknya



saat berlangsung pembakaran. "Misalnya, di mesin mobil, jalur bahan bakar magnet akan terletak di atas blok mesin, di mana pemanasan relatif akan sangat meningkatkan suhu mereka," kata Prasad.

Prasad menjelaskan, penggunaan magnet akan berdampak pada proses pembakaran yang lebih maksimal, efisien, dan tentunya menghemat bahan bakar. Selain itu, dapat mengurangi gas emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Walhasil, lingkungan dapat lebih terjaga dari polusi yang dikeluarkan. "Alat ini merupakan langkah menuju lingkungan yang bersih dan hijau," kata Prasad dalam penelitiannya.

Hasil kajian Prasad patut menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, mengingat negara ini masuk ke dalam lokasi dengan peringkat polusi udara yang tinggi. Dikutip dari hasil kajian Indeks Kualitas Udara (AQI), yang dirilis University of Chicago, Amerika Serikat, Indonesia bertengger di urutan 18 dari 220 negara dalam hal polusi udara. Polusi tersebut banyak diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil.

Selain itu, meski tidak memberikan tawaran bahan bakar baru, tetapi hasil penelitian ini diyakini dapat membantu gerakan menghemat konsumsi BBM hingga 25-40 persen. "Alat ini dapat digunakan pada semua jenis mesin, baik itu berbahan bakar bensin atau pun solar," kata Prasad.



■ MUJAENI

MENGAWASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ISTIMEWA

Di samping untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlakuan khusus dan istimewa pemerintah pusat yang diberikan kepada beberapa daerah otonom juga merupakan bentuk kesadaran bahwa NKRI memiliki berbagai keragaman seperti geografis, sosiologis, historis, politis dan budaya yang sudah pasti menimbulkan permasalahan berbeda. Desentralisasi asimetris saat ini merupakan jalan terbaik untuk mengakomodasi keragaman dan mengatasi masalah yang ada di daerah.

Terdapat tiga jenis desentralisasi asimetris yaitu (1) daerah khusus ibu kota yang melekat pada provinsi Jakarta berdasarkan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) daerah otonomi khusus (otsus) yang melekat pada provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat berdasarkan UU No 44 Tahun 1999 jo UU No 18 Tahun 2001 jo UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (UUPA), UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Papua Barat yang merupakan hasil Pemekaran dari Provinsi Papua diatur dalam UU No 35 Tahun 2008 untuk menetapkan Perppu menjadi UU yang mengatur otonomi khusus di Papua dan Papua Barat; (3) daerah istimewa yang melekat pada provinsi DI Yogyakarta berdasarkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (hal 1-2).

Dana otsus dan dana istimewa pada dasarnya merupakan bagian dari anggaran tambahan pembangunan daerah yang harus digunakan sesuai dengan sasaran dan target. Anggaran tersebut diberikan pemerintah pusat untuk mengatasi ketertinggalan daerahnya. Dengan pengawasan yang efektif dana yang diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat dapat dinikmati dalam bentuk program pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat (hal 256).

Penggunaan dana otsus dan istimewa dikatakan baik apabila telah sesuai sasaran dan target yang dimaksudkan. Kemudian bagaimana pemberlakuan aturan tentang dana otsus dan dana istimewa dipergunakan sebagaimana mestinya, seperti dalam hal pendidikan, pembangunan, ekonomi, infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Tetapi fakta saat ini, tidak semua daerah desentralisasi asimetris tersebut



Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa

Editor : Nyimas Latifah Letty Aziz
R. Siti Zuhro

Penerbit : Yayasan Pustaka Obor
Indonesia

Cetak : Desember 2018

Tebal : 274 hlm

ISBN : 978-602-433-713-1

Harga : -

telah mewujudkan penggunaan dana otsus dengan baik.

Sebagai contoh di Provinsi Papua, masih banyak daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan akses transportasi, sehingga di beberapa wilayah di Papua begitu mahal untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Apakah dana yang diberikan terlalu kecil atau pengelolaan dana otsus yang kurang maksimal. Tentu saja pernyataan tersebut tidak menyalahkan pihak manapun, dan tidak perlu mencari kambing hitam atas hal tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan dana otsus dan dana istimewa kedepannya, agar diseluruh wilayah yang menerima dana ini merasakan manfaatnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, buku ini memberi gambaran penting salah satunya pengawasan yang kurang maksimal. Beberapa bab dalam buku ini juga mengulas dinamika pengawasan dana otonomi khusus dan istimewa. Buku ini merupakan salah satu kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan beberapa orang. Buku ini lebih memfokuskan dinamika pengawasan pada pengelolaan keuangan di daerah dengan status desentralisasi asimetris.

Di dalamnya juga menyinggung beberapa contoh pengawasan seperti pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan untuk internal dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, misalnya, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Namun penulis melihat pengawasan selama ini hanya dilakukan berdasarkan aktor pengawasnya yaitu aktor formal dan aktor informal.

Aktor formal yang dimaksud ada dua macam. *Pertama*, pengawasan for-

mal yang dilakukan antar-level pemerintahan, yaitu pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. *Kedua*, pengawasan intra level pemerintahan, yaitu Inspektorat Provinsi, institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan dana otsus dan istimewa. Sedangkan aktor informal adalah masyarakat sipil yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah (hal 12). Pengawasan juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai pengawasan



BUKU INI JUGA SECARA RINCI MENJABARKAN PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN MAUPUN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BESERTA HAL YANG MELATARBELAKANGI STATUS DAERAH DISENTRALISAI ASIMETRIS

yang dilakukan pada masa Orde Baru dan setelahnya (reformasi). Misalnya mereka melihat, bagaimana nihilnya pengawasan pada masa Orde Baru, serta berbagai upaya untuk menegakkan pengawasan terhadap otonomi daerah dengan mengesahkan dan merevisi UU terkait pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

Buku ini juga secara rinci menjabarkan pengawasan tata kelola peme-

rintahan maupun pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah, beserta hal yang melatarbelakangi status daerah disentralisasi asimetris untuk Provinsi Aceh dan Papua sebagai wilayah otonomi khusus, dan DI Yogyakarta sebagai wilayah istimewa.

Akhirnya pembaca bisa mengatakan, buku ini sangat bagus untuk dijadikan referensi keilmuan maupun dalam penulisan karya ilmiah, masing-masing bab dalam buku ini ditulis oleh orang yang berbeda yang memiliki kepakaran ilmu pemerintahan yang tidak diragukan. Penelitian tentang satu tema namun dengan pembahasan yang berbeda sekaligus bisa menjawab pertanyaan terkait dana otsus dan dana istimewa. Para penulis juga memberikan solusi atas permasalahan yang dibahas di dalam buku ini yaitu terkait pengawasan terhadap dana otsus dan dana istimewa.

Hampir tidak ada cacat dari penulisannya. Namun sedikit yang mengganggu pembaca adalah penyertaan gambar dalam batang tubuh tulisan (hal 16) dengan kualitas gambar yang buruk, sehingga sangat sulit dibaca. Meski gambar tersebut merupakan sebagai bukti pelengkap data, namun pasti membuat cukup dipertanyakan banyak pembaca.

Secara keseluruhan buku ini sangatlah bagus, begitu menarik serta memberikan pengetahuan baru bagi pembaca terkait dana otsus dan dana istimewa dan bagaimana selama ini pengawasan terhadap dana tersebut, serta seperti apa tata kelola pemerintahan pada wilayah otsus dan wilayah istimewa tersebut. Buku ini menjawab berbagai macam pertanyaan terkait informasi dana otsus dan dana istimewa di Aceh, Papua dan DIY.

■ SITI MUNTAMAH



THE BEST OF ENEMIES

Sutradara: Robin Bissell
Pemain: Taraji P. Henson,
Sam Rockwell,
Anne Heche,
Babou Ceesay,
Wes Bentley
Skenario: Robin Bissell
Produksi: 21st Century's,
STX Entertainment
Tayang: 05 April 2019



Perjuangan Perempuan Menghapus Rasialisme

*It's not about you and you're tribe,
it's all about humanity dan respect for
the human race*
(trailer The Best of Enemies)

Kejahatan kemanusiaan merupakan suatu persoalan besar dan sejarah kelam peradaban. Kejahatan kemanusiaan bisa terjadi akibat minimnya bentuk penghargaan terhadap hak kemanusiaan, hingga kemudian menimbulkan diskriminasi ras, suku, dan golongan. Bentuk-bentuk diskriminasi tersebut pula menjadi persoalan sering terjadi seperti halnya perbudakan yang pernah terjadi dahulu. Seorang budak dapat diperjual-belikan dengan bebas karena tidak adanya aturan tentang hak-hak kemanusiaan.

Sejarah Amerika Serikat, misalnya,

mencatat, sejak abad ke-18 praktik perbudakan menjadi legal seiring dengan terbentuknya sistem dan tradisi di mana ras memainkan peran yang sangat berpengaruh. Kebutuhan akan budak pun meningkat, impor budak besar-besaran terjadi. Para budak didatangkan dari berbagai wilayah di Afrika. Memasuki abad ke-19 perbudakan perlahan mulai dihapuskan karena dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan.

Saat perbudakan legal resmi dihapuskan pada abad ke-19 dari peradaban dunia, bahaya rasialisme ternyata belum kunjung usai. Pada 1971 tepatnya di wilayah Durham, Carolina Utara, perlakuan diskriminasi ras kulit hitam sangat terlihat. Saat itu terdapat organisasi lokal yang bernama *Ku Klux Klan*, organisasi yang sangat aktif dalam menyuarakan perbedaan warna kulit dipimpin oleh Claiborne Paul Ellis. Organisasi lokal



ini beranggapan, ras kulit putih memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan ras kulit hitam.

Tidaklah mudah bagi Ann Atwater (Taraji P. Henson) memperjuangkan hak-hak kemanusiaan saat organisasi yang dipimpin Claiborne Paul Ellis (Sam Rockwell) tengah merajalela. Keinginan Ann Atwater sebenarnya sederhana. Ia hanya menginginkan kehidupan yang damai saling berdampingan tanpa adanya perbedaan dan saling membantu atas dasar kemanusiaan.

Kisah Ann Atwater menjadi cerita utama dalam film “*The Best of Enemies*”. Film yang diangkat dari kisah nyata tersebut menceritakan secara singkat namun detail tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa perjuangan Ann Atwater.

Dari trailernya, sepertinya film tersebut benar-benar menampilkan suasana pada 1971, saat dimulainya perjuangan Ann Atwater menyuarakan persamaan hak kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi lagi terhadap golongan ras tertentu. Film ini juga menampilkan

peristiwa selama perjuangan Ann Atwater dalam menuntut haknya.

Trailer *The Best of Enemies* diawali saat sekolah anak Ann yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak berkulit hitam dibakar. Trailer tersebut menampilkan detail perjuangan bagaimana seorang Ann Atwater yang hanya seorang wanita berkulit hitam melawan Ellis-pemimpin *Ku Klux Klan*. Film ini juga menampilkan bagaimana teror yang dialami Ann dan keluarganya. Di sisi lain, Ann harus menghadapi pemerintah yang saat itu kontra terhadap warga kulit hitam. Ann Atwater bersama teman-temannya melakukan protes kepada pemerintah demi menghapuskan diskriminasi. Bagaimana pemerintah menanggapi protes yang dilakukan olehnya, semuanya secara singkat akan tergambarkan dalam film ini.

Demi melawan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap golongan ras kulit hitam seorang aktivis wanita bernama Ann Atwater menyuarakan persamaan antara kulit putih dan hitam. Ann

Atwater sangat menginginkan perlakuan yang sama tanpa mendiskreditkan golongan tertentu. Perjuangannya begitu pelik dengan tantangan yang luar biasa terutama dari golongan ras kulit putih. Setiap jalan yang diambil oleh Ann dalam menyarankan keadilan begitu sangat berbahaya bagi ia dan keluarganya. Tetapi Ann tetap berpegang teguh pada keyakinannya, rasialisme haruslah segera dihentikan agar generasi selanjutnya tidak merasakan hal yang sama yang dialaminya. Atas perjuangannya tersebut kini nama Ann Atwater tercatat sebagai salah satu orang yang berpengaruh dalam perjuangan diskriminasi terhadap golongan ras kulit hitam.

The Best of Enemies disutradarai oleh Robin Bissell yang sekaligus menulis naskah untuk film ini. Film ini memberi kesimpulan sekaligus memberi nilai kemanusiaan. Bahwa perbedaan bukanlah hal yang buruk. Perbedaan seharusnya dapat menyatukan bukan sebaliknya. Film ini akan tayang di bioskop pada 05 April 2019.

■ SITI MUNTAMAH

Tanah Air di Pelataran

Artie Ahmad*

Kabut di Selatan bukit tersibak. Selimut tipis bagai layar drama di punggung bukit itu mulai menghilang diseka sorot matahari pagi. Bunyi kloneng dari andong yang aku naiki sesekali dibunyikan kusir untuk memberi peringatan kepada beberapa orang yang ditemui di jalan. Beberapa dari mereka melambaikan tangan, aku membalasnya. Tanah airku yang kecil demikian banyak berubah. Sesekali aku mengerutkan kening ketika melihat sesuatu yang baru di sana. Jalanan yang dulu tanah, kini telah berganti *plesteran* semen. Bahkan di bibir dusun tadi, jalanan telah menjelma menjadi lapisan aspal yang halus.

Dalam hati aku berbisik, betapa aku tak begitu mengenal lagi tanah airku ini. Tanah di mana aku dilahirkan. Tanah tempat aku dibesarkan. Ternyata aku terlalu lama meninggalkannya. Kini aku kembali, dengan cita baru. Cita yang sesungguhnya masih aku ragukan. Bisakah aku memuwujudkan cita itu? Menggalakkan perubahan dalam pendidikan.

Dari jauh, aku masih mengikuti perkembangan tanah airku ini. Surat dari Ranti, sahabatku itu selalu aku terima dengan baik. Di suratnya, dia begitu banyak bercerita tentang tanah air ini. Tanah air yang bersembunyi di balik punggung bukit. Tanah air yang mulai berbenah fisiknya, namun belum jiwanya. Tanah airku sesungguhnya masih sama seperti dulu. Pendidikan nomor sekian, yang terpenting bisa bekerja. Menambang pasir jauh lebih baik ketimbang giat belajar mengeja dan menghitung.

Ranti, lewat suratnya dia kerap bercerita, betapa perihnya menjadi guru relawan seperti dirinya. Lengkingan luka sahabatku itu aku baca di tiap jengkal suratnya. Tanah air tempat kami bertumbuh belum benar-benar ingin berbenah. Saat itu, aku belum ingin pulang. Tanah air yang melahirkanku tak begitu menarik kala itu. Pemikiran picik itu tumbuh subur di kepalaku, sebelum aku bertemu dengan dia di negeri asing. Seseorang yang mengajarku tentang bagaimana mencintai tanah air kelahiran. Dan menggebahku untuk menjadi seorang manusia yang merdeka. Lantaran dia, aku kembali menemukan Indonesia dalam diriku.

Dia yang menuntunku pulang bertemu kembali tanah air yang telah lama kutinggalkannya. Andai aku tak bertemu dengan dia waktu itu, mungkin aku akan semakin jauh melarikan diri dari tanah air dan diriku sendiri. Luka bisa mengubah orang



menjadi apa saja, aku pun demikian juga. Melarikan diri dari bangsaku sendiri, dan mencari suaka di negeri asing.

Amsterdam di bibir Oktober membawa udara dingin yang belum keterlalu. Masih ada sisa bunga-bunga yang bermekaran. Daun-daun mulai berwarna cokelat. Bagiku, waktu seperti itulah saat paling baik untuk berjalan-jalan. Di sepanjang jalan aku

seringkali bertatap muka dengan pelancong dari Indonesia. Sesekali kami bertegur sapa, sesekali kami saling melempar senyum. Ada sesuatu yang melecut perasaanku tatkala bertemu dengan mereka. Wajah yang seakan serupa denganku mengingatkanku kepada tanah airku yang jauhnya belasan ribu kilometer dari tempatku berdiri.

Tapi aku belum berkeinginan untuk pulang. Negeri asing tempatku sekarang, terasa jauh lebih baik. Ini yang kurasakan sebelum aku bertemu dengannya. Seseorang yang menuntunku perlahan untuk kembali menemui tanah air yang telah lama kutinggalkan.

Sesungguhnya, aku beberapa kali melihatnya duduk di bangku panjang itu. Bangku kayu yang menghadap ke arah *Oude Kerk*. Dia akan duduk diam-diam. Matanya yang tua akan mengawasi siapa saja yang berlalu-lalang di hadapannya. Perlahan aku duduk di sampingnya. Seperti dirinya, aku turut duduk diam memandangi *Oude Kerk* yang berdiri kokoh di hadapan kami.

"Kau sendirian?" Tanyanya sembari menoleh ke arahku.

Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaan. Terlebih saat dia memakai bahasa ibu.

"Ya. Saya selalu sendiri," jawabku perlahan.

"Di negeri asing ini?"

"Di mana saja. Saya selalu sendiri,"

Aku mendengar tawa kecilnya.

"Kau tentunya dari Indonesia juga kan?"

Aku mengernyitkan kening, "Anda juga dari Indonesia?"

Dia mengangguk.

"Tanah airku itu. Indonesia."

Suaranya demikian perlahan, tapi aku masih menangkap suaranya. Dengan saksama aku mengamatinya. Ada percikan air di matanya. Seperti kristal yang diterpa matahari sore. Di sudut matanya.

"Anda sedang berlibur di sini?" Aku bertanya lagi. Kali ini lebih hati-hati. Sekali lihat saja, aku tahu ada yang tak menyenangkan di wajahnya. Kesedihan yang tiba-tiba muncul di permukaan wajahnya.

"Tidak. Aku tinggal di sini. Kau sendiri?"

"Saya berusaha untuk bisa tetap tinggal di sini,"

"Mengapa?"

Aku menggeleng. Sulit bagiku menjelaskan betapa luka yang membawaku berlari sejauh ini.

"Kau marah dengan seseorang di sana?"

"Saya kecewa. Dengan orang-orang, bahkan dengan bangsa saya sendiri," ucapku perlahan.

"Kau kecewa, lantas meninggalkan negara dan orang-orang di sekitarmu. Bangsamu terlalu mahal untuk menebus kekecewaanmu,"

"Entah berapa kali saya dikecewakan. Tentang banyak hal. Saya selalu membenahi semuanya, tapi tak terlihat dan sia-sia. Saya ingin lari. Sudah hampir lima tahun di sini,"

"Andai aku dirimu. Aku akan pulang. Bertemu kembali dengan tanah tumpah darah,"

"Lalu kenapa Anda tidak kembali?"

"Aku sering pulang ke Indonesia. Bukan sebagai bagian dari diri mereka lagi, melainkan sebagai pelancong. Aku telah menjadi turis di negeriku sendiri sejak berpuluh-puluh tahun lalu."

Obrolan kami di penghujung sore di depan *Oude Kerk* itu membawa angin yang terasa lain. Kami berkenalan saat itu. Aku memanggilnya Tuan Franco. Jika aku datang ke negeri asing ini sebagai pelarian, Tuan Franco lain lagi. Dia datang ke negeri asing ini sebagai pesakit.

"Aku datang kemari dengan luka, namun luka yang berbeda denganmu. Aku dipaksa menanggalkan kewarganegaraanku. Aku kehilangan kebangsaanku. Aku menjadi orang asing di negeri asing. Aku tetap akan selalu asing di sini. Bahkan menjadi orang asing di tanah airku sendiri."

Mendengar penuturannya aku terdiam. Menjadi orang asing di negeri asing. Menjadi orang asing di negerinya sendiri.

"Tapi, aku tetap Indonesia. Mungkin tidak lagi dengan *paspor* atau status kewarganegaraanku. Tapi di kepala dan hatiku. Pikirkan baik-baik, Lindu. Apa kau tak ingin kembali?"

Aku tak bisa segera menjawab. Jauh di hati kecilku, sesung-

guhnya aku tak rela melepaskan kebangsaanku. Aku belum benar-benar siap untuk itu. Rindu juga seolah berkembang setiap waktu. Suara-suara Ibu di negeriku yang jauh seakan selalu memanggil. Tapi, luka yang aku bawa seakan sulit sembuh. Pengkhianatan seorang kekasih berbaur menjadi satu dengan penolakan-penolakan karya yang aku lahirkan. Pemerintah waktu itu tak mendukungku. Aku tersisih di tengah perjuangan. Aku merasa begitu dikhianati. Saat itu tak ada pilihan selain untuk lari. Pergi menjauh ke negeri lain.

Tuan Franco Samadi, seorang veteran dalam nasib membawaku dalam pemikiran baru. Betapa mahal harga kebangsaanku. Kecewa tak sepadan dengan mengorbankan Indonesia dalam paspor dan jiwaku.

Nyaris setiap hari aku bertemu dengannya di depan *Oude Kerk*. Setiap kali dia bercerita, tentang perihnya menjadi orang asing di negeri asing. Betapa sakitnya menjadi pelancong di tanah airnya. Dan surat-surat Ranti yang kerap membawa suara pilu tentang pendidikan itu, semakin membawaku ingin kembali.

TAPI, AKU TETAP INDONESIA.
MUNGKIN TIDAK LAGI DENGAN
PASPOR ATAU STATUS
KEWARGANEGARAANKU. TAPI
DI KEPALA DAN HATIKU

"Negeri kita berbenah, Lindu. Dusun kita kini tambah molek. Pembangunan di mana-mana. Bahkan beberapa pabrik mulai berdiri di pinggiran kota. Tapi untuk pendidikan, belum semolek pembangunan fisik. Aku rasanya hampir menyerah. Mereka, orang-orang tua itu lebih bahagia jika anak mereka bisa bekerja di usia dini, ketimbang bersekolah! Ada kalanya aku lelah. Berjuang sendiri tak mudah. Sesekali aku berpikir sepertimu, ingin lari saja.

Tapi andai kau pulang. Aku akan bertahan. Negara kita akan lebih baik, Lindu. Diawali dengan hal kecil, semisal memberantas buta huruf. Aku berharap kau kembali...'

"Aku berharap kau kembali...'

Tuan Franco dan surat-surat Ranti yang menuntunku pulang. Setelah aku sadar, yang membuatku kecewa adalah beberapa manusia dalam hidupku. Tapi bangsa dan tanah airku, mereka tak pernah membuatku terluka.

Aku bertemu Ranti dengan sedikit keterkejutan. Kawanku itu seakan jauh lebih tua sepuluh tahun dari usianya sendiri. Ternyata, surat-surat untukku gambaran nyata yang sedang dia alami. Dusun kami mulai berbenah. Segala hal banyak yang baru. Tapi ada yang seakan tetap seperti dulu. Pendidikan di dusun yang bersembunyi di balik bukit ini tak banyak berubah. Anak-anak lebih banyak yang bekerja. Mereka berladang atau menambang pasir dan batu kali.

Lebih menyedihkan lagi, tatkala aku menerima kenyataan bahwa sekolah dasar tempatku bersekolah dulu telah lama tutup. Bangunannya nyaris hancur. Alang-alang setinggi dada

orang dewasa tumbuh subur. Aku mengamati kondisi memuliskan itu dengan dada yang bergejolak. Pendidikan di dusun ini tak banyak berubah. Bahkan, dulu kawan sebayaku yang bisa bersekolah sampai jenjang tinggi hanya Ranti seorang dan diriku sendiri.

"Apa kau tahu berapa jumlah anak-anak yang buta huruf?" Tanyaku kepada Ranti.

"Aku belum mendatannya. Tapi setidaknya, lebih dari seperempat anak di dusun kita ini belum bisa membaca," jawab Ranti.

"Kau mengajar di mana? Sekolah kita dulu hancur," tanyaku ketika ingat bangunan sekolah kami yang nyaris rubuh.

"Di halaman rumahku. Sementara di sana,"

"Berapa muridmu?" Aku menoleh ke arah kawan karibku itu. Usahanya untuk memajukan pendidikan di dusun kami rupanya sangat berat.

"Sepuluh anak."

Aku tercekat. Satu dusun yang cukup luas ini hanya sepuluh anak?

"Ah, seharusnya kau cari seorang lagi. Biar jadi sebelas anak,"

"Lalu, kalau sudah sebelas anak mau apa?"

"Ajari mereka bermain bola. Biar mereka menjadi kesebelasan!"

Mendengar jawabanku, Ranti tertawa. Bunyi randu yang pecah terdengar. Kami akan memulai hal baru. Mencari murid lagi, untuk diajar membaca.

Aku mulai bergerilya, mencari buku-buku bacaan dan segala hal untuk mengajar. Tapi rupanya, mengajak anak-anak dusun belajar jauh lebih susah. Mereka lebih suka bekerja dan bermain. Ranti agaknya sudah gagal mengajak mereka, jadi tugas itu aku ambil alih. Seperti seorang pakar, aku memberikan pengertian tentang pentingnya pendidikan kepada mereka. Aku mengikuti anak-anak dan orang tua yang sedang sibuk bekerja di ladang. Aku berbicara di tepian sungai ketika mereka menambang pasir. Sampai serak rasanya tenggorokanku, tapi usahaku tak sia-sia. Lima murid baru kami dapatkan. Semangat Ranti yang nyaris pupus mekar kembali.

Seperti siang ini, aku bertamu di rumah Ismiyati. Ismiyati sesungguhnya kawan sebayaku. Dulu, saat kanak, kami sering bermain bersama. Kini, Ismiyati telah menjadi seorang ibu. Anaknya tiga. Ketiganya tak bersekolah. Aku tahu dari Ranti, bahwa Ismiyati lebih menghendaki anaknya bekerja ketimbang belajar berhitung dan mengeja.

"Hidupku teramat berat. Sudah baik anak-anak itu mau bekerja. Anakku yang besar sudah bisa membaca," ketusnya suara

Ismiyati membuat perasaanku tak enak.

"Ah, tapi bisa membaca saja tak cukup. Anak-anak itu butuh pendidikan yang lebih baik," jawabku berusaha sesantai mungkin.

"Kau sendiri jauh-jauh belajar sampai keluar negeri hanya mentok jadi pengajar di sini," Ismiyati tersenyum masam.

Aku tertawa kecil. Ismiyati yang aku hadapi tetaplah Ismiyati yang dulu. Manusia yang sering ngotot saat bermain. Ngambek ketika mendapat sedikit buah kersen yang kami petik.

"Aku bisa saja menjadi guru di sekolah swasta yang mahal di kota. Atau jadi guru negeri. Atau jadi pegawai lainnya. Aku tinggal memilih. Tapi aku memilih di sini. Aku ingin anak-anak di dusun kita ini pintar. Termasuk anak-anakmu itu. Apa kau tak ingin anakmu bernasib sepertiku? Sekolah tinggi dan mudah saja mencari pekerjaan yang baik. Atau kau lebih bangga anakmu menjadi pemecah batu kali saja?"

Ismiyati tercenung. Wajahnya yang jauh lebih tua itu seakan menerawang. Lama dia tak memberikan jawaban. Sampai akhirnya aku pulang. Tapi keesokannya, dua anak Ismiyati datang ke rumah Ranti dengan bekal sebuah buku tulis dan sebuah pulpen.

Aku mulai mengirimkan surat kepada pemerintah agar sekolah yang ditutup kembali dibuka. Di dalam surat aku juga menuliskan bahwa aku dan Ranti rela menjadi guru honorer. Anak-anak harus diberi pendidikan yang layak. Tanah airku yang kecil harus melek pendidikan.

Banyak kawan yang bertanya kenapa aku rela melakukan semua hal itu untuk dusunku yang kecil. Pertanyaan itu kerap dilontarkan sebelum mereka mengajukan diri sebagai relawan pengajar dan penyumbang sarana pendidikan.

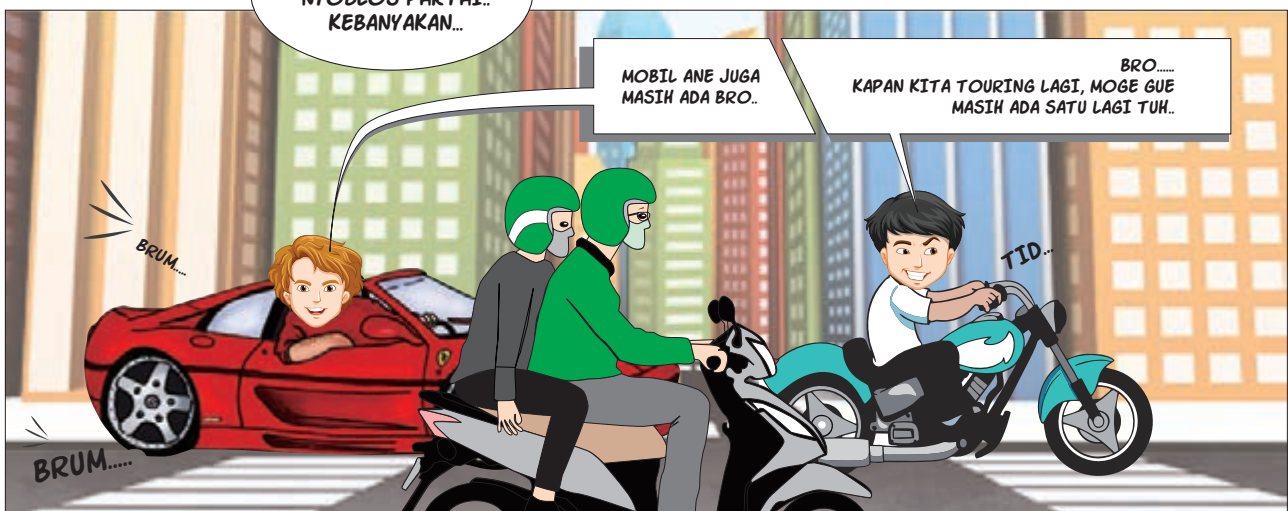
"Dari dusunku yang kecil, akan memberikan sesuatu yang berguna untuk Indonesia nantinya. Aku yakin itu." Jawabku diplomatis.

Ranti pengajar yang baik. Dari dia aku menemukan optimisme dalam mengajar. Dari tanah airku yang kecil, aku masih kerap mengingat Tuan Franco Samadi. Seseorang yang membawaku kembali ke tanah airku, dan turut membunuh rasa kecewa yang selama beberapa tahun tumbuh di hatiku.

"Pulanglah. Tanah airmu menunggu kepulanganmu. Bangunlah negaramu dengan karyamu. Jangan menukar rasa kecewamu dengan kebangsaanmu sendiri. Jangan menjadi orang asing di negerimu sendiri. Nanti kau akan menyesal."

Setiap kali aku mengingat ucapannya itu, aku tersenyum. Di negeri asing itu, aku menemukan jati diri. Rasa Indonesia dalam hatiku. Dan memang tak ada tempat paling baik untuk kembali, selain tanah airku itu sendiri..

*ARTIE AHMAD lahir di Salatiga, 21 November 1994. Saat ini berdomisili di Salatiga. Beberapa tulisannya dimuat di beberapa surat kabar. Novel solonya *Turning Seventeen* (Penerbit Elexmedia, 2015) dan *Cinta Cowok DL-Ers* (Penerbit Mazola, Divapress, 2014), *Sunyi di Dada Sumirah* (Penerbit Buku Mojok, 2018), dan kumpulan cerita pendek *Cinta yang Bodoh Harus Diakhiri* (Penerbit Buku Mojok, 2019).



KOMIK BANG PEPE
PILIH PARTAI

Menuju Satu Digit Angka Kemiskinan

Dalam rangka mewujudkan angka kemiskinan satu digit, pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Kelitbang se-Sumatera Selatan pada 21 Maret 2018. Melalui Rakorda, diharapkan lembaga Litbang dapat menghasilkan inovasi program untuk mewujudkan angka kemiskinan satu digit.

Mengangkat tema “Peran Lembaga Litbang untuk Mewujudkan Angka Kemiskinan 1 (satu Digit)”, Rakorda tersebut memunyai peran strategis lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagai “*think tank*” pemerintah daerah yang kritis untuk menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah, serta menghasilkan inovasi program untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan, sehingga dapat menyelaraskan program sesuai dengan RPJMD 2018-2023. Rakorda juga berupaya mewujudkan iklim yang lebih kondusif dan penyeselarasan program, baik program pemerintah pusat dan daerah.

Rakorda tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber, yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riyadmadji, Direktur Lembaga Litbang Kementerian Riset, Teknologi dan Dikti Kemal Prihatman, dan Kepala Bappeda (Plt. Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih.

Dalam Rakorda tersebut **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyadmadji** mengatakan, kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yakni sandang, pangan, dan papan yang diukur dari sisi pengeluaran.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, presentase kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 12,80%. Angka tersebut masih di atas angka nasional 9,66%. Artinya, tingkat kemiskinan di Sumsel lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Untuk itu, peran lembaga litbang dalam menurunkan angka kemiskinan sangatlah penting. Seperti, menyusun rencana aksi untuk menanggulangi kemiskinan, menyusun indikator pengukuran kemiskinan, dan mendefinisikan dan mengukur kemiskinan,” imbuhnya.

Sementara **Kemal, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi** mengatakan ada 5 (lima) prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019,



yakni: (1) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, (2) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, (3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, (4) pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, (5) dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu. “Program prioritas tersebut didukung oleh aktivitas penelitian dan pengembangan,” jelasnya.

Arah kebijakan prioritas nasional dari sisi inovatif adalah bagaimana mengurangi kemiskinan dengan menerapkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan



produktivitas tersebut maka akan menghasilkan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat memecahkan masalah kemiskinan. “memperkuat inovasi dan penguasaan teknologi, serta menghasilkan produk yang unik/produk kompetitif adalah cara yang ampuh untuk bersaing dengan produk dari luar,” ungkapnya.

Ia berpesan lembaga litbang harus fokus, inovatif, kreatif, rasa memiliki yang tinggi, dan berkomitmen. Sehingga, masyarakat dapat merasakan hasil yang telah diteliti. “Jangan hanya selesai di *output* saja, tetapi juga harus dapat bermanfaat buat masyarakat,” terangnya.

Menurut **Ekowati Retnaningsih,**

Kepala Bappeda (Plt. Balitbang-da) Provinsi Sumsel, Rakorda kali ini memunyai peran strategi untuk menyelaraskan program sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023. Ia menambahkan program yang direncanakan harus berkesinambungan dari tahun ke tahun sampai masa jabatan gubernur selesai. Pada 2019 merupakan tahun pertama penerapan anggaran dalam RPJMD 2018-2023 guna mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018-2023 yaitu Sumsel Maju untuk Semua.

Terkait lembaga litbang, Ekowati mengatakan BPP tidak hanya sebagai *think tank* pemerintah daerah tetapi juga sebagai kepanjangan tangan

dari fungsi kelitbang yang mampu mengedepankan inovasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. “Lembaga litbang harus mencari cara bagaimana strategi yang terbaik, tercepat, dan efektif untuk melakukan percepatan-percepatan di dalam mengembangkan inovasi. Salah satu strategi untuk menciptakan dan mempercepat inovasi sampai kepada masyarakat adalah melalui pembentukan pusat-pusat inovasi dan jejaring intertek di setiap kabupaten/kota dibawah naungan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mendongkrak angka kemiskinan menjadi satu digit di Sumsel,” jelasnya.

■ FRISKA NATALIA

Mengelola PLBN Skouw

Selama empat tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-JK kondisi perbatasan RI kini lebih baik. Setidaknya ada tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berdiri megah, tidak terkecuali PLBN Skouw yang terletak di distrik Muara Tami, Kota Jayapura menjadi pembatas antara Indonesia dengan Papua. Upaya pembangunan PLBN tersebut bagian dari misi pemerintahan Jokowi untuk menegakkan kedaulatan di perbatasan. Pemerintah memberikan perhatian kepada daerah tertinggal melalui pendekatan pembangunan wilayah. Pembangunan di perbatasan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian lokal, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat Skouw.

O.J. Martinez (1994) mengkategorikan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini termasuk tipe *interdependent borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, terlibat dalam pelbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara. Misalnya, salah satu dari pihak mempunyai fasilitas produksi, sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Perbatasan ini juga masuk dalam tipe *integrated borderland*, yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Namun, tingginya intensitas keterlibatan penduduk dalam pelbagai kegiatan perekonomian dan persekutuan yang erat tersebut, melahirkan banyak masalah seperti penyelundupan manusia, penyelundupan sumber daya alam, hingga perdagangan narkoba. Hal itu dikarenakan perbatasan Skouw adalah perbatasan dengan banyaknya akses ilegal (jalan tikus) yang sering digunakan oleh masyarakat kedua negara dalam melintasi batas negara antara Papua dan Papua Nugini. Terdapat 25 akses ilegal yang sering digunakan penduduk setempat. Dan sejauh ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat. Pemerintah setempat beralasan, belum ditutupnya 25 akses ilegal tersebut, pasalnya pengguna akses tersebut adalah masyarakat yang mempunyai tanah di wilayah kedua negara, serta tingginya potensi konflik yang terjadi di



www.cartoonmovement.com

Papua. Keadaan tersebut menyebabkan pembentukan Tim Satgas penutupan akses jalan ilegal sejauh ini belum dilakukan.

Pengelolaan PLBN

Merujuk hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendagri 2018, permasalahan lain pengelolaan perbatasan di Skouw adalah pengelolaan PLBN seperti pada aspek kelembagaan, tata kelola, sumber daya manusia, alokasi anggaran, sarana prasarana,

fasilitas pendukung, serta review kebijakan terhadap iklim investasi.

Dalam aspek kelembagaan, misalnya, menurut Perpres No 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan BNPP, menunjuk posisi Kepala PLBN adalah Kepala Bidang Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN setingkat eselon 3. Sementara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sering terhambat oleh masalah koordinasi antar K/L. Sehingga koordinasi yang dilakukan oleh BNPP harus melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemenkes, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan TNI/Polri.

Persoalan lain seperti adanya kebijakan yang bertentangan dengan aturan keimigrasian yang dibentuk Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, yang kemudian menyebabkan PLBN kesulitan dalam menegakkan aturan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus tersebut terjadi karena adanya pembagian tugas fungsi di antara PLBN dengan Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri. Di sisi lain, aturan Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri mengharuskan PLBN menjadi Badan Perbatasan Daerah, namun sampai sekarang belum juga terjadi.

Dalam aspek tata kelola yang meliputi kewenangan, tugas dan fungsi, mekanisme, dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), pengelolaan kawasan PLBN saat ini belum diatur berdasarkan sistem otoritas yang mengintegrasikan fungsi dan kewenangan K/L dan pemerintah daerah, terkait kewenangan integratif. Sehingga Kepala PLBN tidak memiliki kewenangan untuk mengatur K/L yang terkait dalam pengelolaan perbatasan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi keamanan belum mengikuti pelaksanaan SOP. Pemeriksaan awal bagi pelintas batas sesuai SOP semestinya merupakan tugas Angkatan Pura *Security* bersama petugas imigrasi. Namun, yang terjadi, anggota TNI dan Polri juga ikut terlibat

Alexander Yanuard Dalla

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri-RI



dalam pemeriksaan pos terdepan keamanan sehingga implikasinya pelintas batas yang diperiksa kerap merasa terganggu dan tidak nyaman.

Begitu juga dalam aspek sumber daya manusia, secara kuantitas jumlah sumber daya manusia di PLBN Skouw sangat minim yaitu hanya 13 orang, dengan komposisi struktur 1 orang eselon III, 4 orang Eselon IV, 2 orang Staf/JFU, 5 orang *Supporting Staff*, dan 1 orang Tenaga Pembantu/Sopir. Dari komposisi ini bisa dibayangkan bagaimana cara mereka mengoordinasikan pelaksanaan tugas di PLBN. Tidak hanya terbatas dalam hal jumlah, secara kualitas pun jumlah tenaga kerja di PLBN yang tersertifikasi pada bidang pengelolaan keimigrasian masih kurang sehingga profesionalitas dan keahlian dalam melakukan tugas belum *mumpuni*.

Masalah pengelolaan juga tampak seperti dalam aspek penganggaran, Kepala PLBN yang semestinya setingkat Eselon III sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sebagaimana Perpres No 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan BNPP. Namun saat ini Kepala PLBN ditempatkan sebagai Pengelola Anggaran. Dengan begitu semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran operasional di PLBN harus diusulkan melalui BNPP yang secara posisi bertempat di Jakarta. Rentang kendali ini menyulitkan PLBN Skouw dalam perencanaan penganggaran pelaporan dan pertanggungjawaban.

Belum lagi jika diperhatikan dalam aspek sarana dan prasarana. Sebagai contoh, Pasar Skouw yang dibangun untuk peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terletak di dalam area PLBN. Padahal sesuai dengan standar keamanan, letak pasar seharusnya berada di luar zona PLBN. PLBN Skouw juga belum dilengkapi dengan teknologi/alat mendeteksi virus yang dibawa oleh para pengunjung. Beberapa aspek juga belum terpenuhi seperti tempat tinggal petugas *custom*, petugas migrasi dan *quarantine*.

Kesadaran pemerintah diperlukan

Permasalahan-permasalahan di atas selama ini tidak begitu tampak di permukaan. Dan bisa saja itu terjadi tidak hanya di PLBN Skouw. Untuk meminimalisasi beberapa permasalahan tersebut tindakan tegas dan kesadaran semua pihak khususnya pemerintah tidak bisa lagi ditunggu. Otoritas kewenangan perlu diberikan kepada Kepala PLBN dalam hal mengoordinasi tugas dengan K/L lain meskipun secara jabatan setingkat Eselon III. Selain itu, diperlukan aturan pembagian kewenangan yang tegas antara Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri dengan PLBN, seperti aturan tentang

keimigrasian sepenuhnya diberikan ke PLBN. Sedangkan pemerintah daerah khusus mengatur tentang pelayanan masyarakat pada kawasan perbatasan.

Penataan kelembagaan perbatasan perlu dilakukan antara Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua menjadi Badan Perbatasan Daerah yang dilihat dari peran dan fungsi kelembagaan. Aspek tata kelola pengelolaan kawasan PLBN juga perlu diatur berdasarkan sistem otoritas, yang mengintegrasikan fungsi dan kewenangan K/L dan Pemerintah Daerah, terkait kewenangan integratif. Selain itu juga perlu penegasan kembali tentang prosedur keimigrasian *custom*, imigrasi, *quarantine* dan *security*. Khusus untuk pemeriksaan awal cukup dilakukan oleh *Angkasa Pura Security* bersama petugas imigrasi. Sehingga anggota TNI dan Polri tidak perlu terlibat dalam pemeriksaan pos terdepan keamanan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia tidak kalah penting. Untuk itu, dalam hal ini, Biro Kepegawaian Kemendagri perlu menambah jumlah pegawai di PLBN Skouw dan untuk pegawai yang telah ditempatkan di PLBN tidak diperkenankan mutasi sebelum kekuatan sumber daya yang tersedia telah memadai. Peningkatan kualitas tenaga kerja di PLBN yang tersertifikasi juga bisa dilakukan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pada bidang pengelolaan keimigrasian.

Dalam aspek penganggaran, pemberian kewenangan kepada PLBN dalam pengelolaan keuangan dan proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran mutlak harus dilakukan sehingga PLBN lebih fleksibel dan mudah dalam pelaksanaan operasional kegiatan. Begitu pun dengan aspek sarana dan prasarana. Pemerintah perlu meningkatkan teknologi/alat mendeteksi virus pada saat pemeriksaan awal sebelum melintasi batas, mendorong penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang masih belum selesai dikerjakan, khususnya juga tempat tinggal petugas *Custom*, Imigrasi dan *Quarantine*. Di sisi lain, pembangunan Pasar Skouw perlu di kaji kembali tentang letaknya yang sekarang berada di dalam area PLBN karena untuk standar keamanan letak pasar seharusnya berada di luar zona PLBN.

Dengan begitu diharapkan beberapa permasalahan tata kelola PLBN Skouw bisa di atasi. Jika tidak dilakukan pembenahan di internal, lalu bagaimana bisa menyelesaikan kasus yang lebih besar seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi di Indonesia.

Kerja Sama Mengendalikan Inflasi Daerah

Di dalam penetapan asumsi makro APBN 2019, target inflasi tahunan dipatok 3,5%. Angka tersebut relatif moderat jika dibandingkan *outlook* 2018 yang berkisar 3,2% atau realisasi 2017 yang mencapai 3,6%. Keputusan menetapkan target inflasi tersebut sekiranya sudah memerhatikan berbagai kondisi perekonomian global yang sedang menghangat akibat dampak ketegangan perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok yang belum berakhir. Meningkatnya ketegangan geopolitik di beberapa wilayah, tekanan pasar akibat normalisasi moneter AS, moderasi Tiongkok, serta isu proteksionisme, memaksa negara-negara berkembang meninjau ulang agenda utama pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang disusun.

Untuk kasus Indonesia, tahun 2019 akan diwarnai meningkatnya investasi meski masih relatif didominasi oleh belanja konsumsi. Dalam asumsi, sumbangan investasi 2019 diharapkan mencapai angka 7,0% dengan kontribusi konsumsi pemerintah 5,4%, konsumsi rumah tangga 5,1%, kegiatan ekspor 6,3% dan impor 7,1%. Beberapa faktor pendorong utama bekerjanya mesin pertumbuhan investasi di antaranya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur yang diharapkan memberikan dampak pertumbuhan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak serta sejumlah langkah penting reformasi pemerintah atas perizinan dan kepastian hukum usaha.

Khusus *item* inflasi, pergerakannya diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan pergerakan nilai tukar rupiah di samping perkembangan perekonomian global dan domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga memiliki rekam jejak yang positif dalam menjaga laju inflasi ke arah yang stabil. Hal ini didukung oleh keberhasilan menjaga inflasi inti dengan intervensi yang tepat pada komponen *volatile food* seperti bahan pangan. Secara bersamaan kebijakan reformasi subsidi energi juga memaksa *administered price* dapat dijinakkan meski tetap diwaspadai pergerakan ke depannya. Presiden juga selalu memberikan perhatian agar pemerintah selalu memprioritaskan upaya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan barang, kelancaran distribusi, perbaikan efisiensi pasar plus pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

Dalam upaya menjaga inflasi yang terkendali, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPI) dan daerah sepakat untuk menye-



suaikan harga-harga yang diatur pemerintah saat inflasi rendah. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan misalnya menaikkan elpiji atau BBM sesuai dengan *timing* yang tepat. Contoh *timing* yang tidak tepat misalnya awal 2017 ketika pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi Rp 300 per liter bersamaan dengan pencabutan subsidi listrik bagi kelompok pengguna 900 VA plus kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Kebijakan tersebut sontak menuai banyak polemik di masyarakat serta dianggap tidak peka dengan kondisi yang ada. Pelaku usaha bahkan memprediksikan kenaikan tersebut akan mengerek harga BBM industri sekaligus inflasi via kenaikan harga makanan dan minuman sekira 5%. Untungnya upah minimum provinsi (UMP) 2017 naik rata-rata 8%, sehingga daya beli masyarakat diharapkan masih relatif memadai.

Pemerintah sendiri menyebutkan, efek kenaikan harga BBM dirasakan pada Maret-April 2017. Dampaknya pun relatif kecil kurang dari 0,01%. Sama halnya dengan dampak pencabutan subsidi listrik yang diupayakan sekitar 0,05%. Dengan demikian target inflasi tahun 2017 sebesar 4% diyakini masih ada di dalam rentang yang terkendali, mengingat perubahan harga komponen komoditas pangan merupakan kontributor terbesar inflasi. Dengan demikian diyakini selama pemerintah masih mampu menjaga harga pangan, maka BBM dan listrik relatif dapat diminimalkan dampak sumbangannya terhadap inflasi.

Peran kerja sama antar-daerah

Kekhawatiran pelaku usaha sebetulnya relatif wajar. Namun demikian, mengutip data historis persoalan inflasi di Indonesia sejatinya lebih banyak dipengaruhi oleh *supply shock* dan kebijakan *administered price*. Jika sumber inflasi adalah gangguan sisi produksi, maka penanganan jangka pendeknya dapat dilakukan dengan relatif cepat melalui peningkatan pasokan baik impor maupun intervensi pasar yang terukur, dengan tetap memerhatikan keseimbangan di sisi permintaan dan penawaran. Di sinilah kemudian peran kerja sama antar-daerah sangat berpotensi menggantikan kebijakan impor yang selama ini menjadi bentuk intervensi pemerintah.

Kerja sama antar-daerah juga akan mendukung percepatan laju pembangunan infrastruktur ketika arus perdagangan terjadi secara merata dan sempurna, sehingga ketimpangan

Joko Tri Haryanto

Peneliti Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan-RI



tingkat kesejahteraan antar-daerah akan berkurang. Konektivitas pada akhirnya akan menciptakan kesetaraan harga barang di seluruh pelosok daerah sehingga ke depannya cerita harga semen berbeda di Pulau Jawa dan Papua tentu tidak akan terjadi lagi. Laju pertumbuhan infrastruktur yang cepat tentu akan membutuhkan dukungan perluasan telekomunikasi yang lebih andal sehingga setiap bentuk transaksi yang ada dapat dilakukan secara *online*.

Beberapa contoh konsep kerja sama antar-daerah ini juga telah dibuktikan secara langsung di lapangan, misalnya ketika Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sulawesi Selatan mengimplementasikan konsep kerja sama antar-daerah melalui pertukaran komoditas beras, buah-buahan dan sayuran. Beberapa pihak juga memandang konsep kerja sama antar-daerah ini merupakan solusi terbaik dalam menangkal arus impor komoditas yang sering menjadi persoalan pelik di Indonesia.

Sayangnya, praktik-praktik kerja sama antar-daerah yang ada saat ini lebih didorong oleh inisiatif murni dari kepala daerah, bukan dari Pemerintah Pusat, meskipun seharusnya peran dari pemerintah sangat besar. Secara regulasi konsep kerja sama antar-daerah sudah diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Bab IX tentang Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan pasal 195 ayat 1 disebutkan "dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan kepada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan". Di dalam ayat 2 nya juga dijelaskan "kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar-daerah yang diatur dengan keputusan bersama".

Secara lebih detail, aturan mengenai kerja sama antar-daerah sudah diatur dalam PP No 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Antar-Daerah. Di dalam ketentuan umumnya dijelaskan, definisi kerja sama antar-daerah adalah usaha bersama antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan kepada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama daerah dengan daerah lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dalam menjalankan KSDD ini, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Selanjutnya subyek pelaksanaan KSDD dapat

bersifat wajib dan sukarela. Kerjasama yang bersifat wajib dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola secara bersama. Sementara kerja sama yang bersifat sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif apabila dikerjakan secara bersama.

Obyek yang dapat dikerjasamakan sangat tergantung kepada diskresi daerah masing-masing. Dasar pertimbangan utamanya, obyek tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Obyek tersebut juga wajib tercatat di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disetujui oleh pihak perlemen. Apabila terdapat sebuah obyek yang belum tercatat di dalam dokumen perencanaan namun dirasa memenuhi kriteria untuk dikerjasamakan, maka daerah dapat mengajukan tambahan usulan dengan mempertimbangkan tujuan mengatasi kondisi darurat, mendukung pelaksanaan program strategis nasional serta melaksanakan penugasan sesuai asas tugas pembantuan.

Untuk memfasilitas KSDD ini, pemerintah daerah dapat menyusun sebuah sekretariat kerja sama. Sekretariat tersebut harus memenuhi unsur dilaksanakan secara terus menerus, memiliki kompleksitas tinggi sekaligus berdurasi masa kerja minimal 5 tahun. Sekretariat ini juga bertanggung jawab jika dalam perjalanannya muncul konflik antar-daerah dalam skema KSDD. Sekretariat harus menjadi pihak yang mempertemukan keseluruhan daerah yang terlibat di dalam perselisihan hingga dicapainya kata kesepakatan bersama. Beberapa hal yang memungkinkan terhentinya KSDD di antaranya berakhir jangka waktu KSDD, tujuan telah tercapai, kesepakatan untuk mengakhiri kerjasama atau obyek KSDD hilang dan musnah.

Selain komoditas, banyak hal yang dapat dijalankan dalam mekanisme kerja sama antar-daerah di antaranya pengelolaan inflasi, pembangunan infrastruktur, serta perluasan jaringan telekomunikasi. Di tengah derasnya laju pertumbuhan ekonomi di daerah, fungsi pengelolaan inflasi menjadi hal yang sangat penting. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi, selain menggerus daya beli, juga akan menyulitkan pelaku usaha di dalam mengkalkulasi biaya input produksi dan secara makro dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi.

Wajib Coblos!

Dalam setiap kesempatan, hampir semua elemen bangsa ini yang terlibat dalam pemilu, baik itu anggota/calon legislatif, presiden/calon presiden, pemerintah pusat/daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, bahkan Majelis Ulama Indonesia menyerukan JANGAN GOLPUT! Artinya, setiap warga negara yang telah memiliki hak politik, diserukan untuk memilih dalam pemilu serentak yang akan berlangsung pertama kali pada 17 April 2019 nanti.

Seruan itu dimaksudkan agar partisipasi politik warga negara meningkat. Maklum saja, dari waktu ke waktu, tingkat partisipasi itu cukup rendah. Data KPU menunjukkan, jumlah golput naik dari 48,3 juta orang pada Pilpres 2009 menjadi 58,9 juta orang pada Pilpres 2014. Itu sebabnya, KPU menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 mencapai 77,5 persen dari total daftar pemilih tetap yang telah dikeluarkan KPU RI sebanyak 185.989.880.

Tingkat partisipasi yang rendah dan golput, oleh sebagian orang kerap disamaartikan. Menurut Grant M. Hayden (2010) dalam artikelnya "Abstention: the Unexpected Power of Withholding Your Vote" yang diterbitkan Connecticut Law Review, golput karena sikap tidak peduli umumnya disebabkan oleh tendensi pemilih yang apolitis. Artinya, pemilih semacam ini memang tidak peduli dengan dinamika politik dan pengaruhnya. Hingga akhirnya ia malas datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Istilah atau nomenklatur golput sendiri, senyatanya tidak dikenal dalam regulasi yang berkaitan dengan pemilu. UU Pemilu dan Peraturan KPU juga tidak mengenal istilah golput. Yang dikenal adalah istilah memengaruhi atau mengajak tidak memilih peserta pemilu tertentu. Pasal yang dapat diperumpamakan dengan golput tertera dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 515, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah."

Istilah golput sendiri di Indonesia berasal dari gerakan golongan putih yang digalakkan aktivis Arief Budiman. Gerakan ini berawal dari gerakan protes atas penyelenggaraan pemilu pada masa Orde Baru 1971. Gerakan golput semacam itu bisa dianggap sebagai gerakan politis dan bukan merupakan bentuk dari apatisisme ataupun

kemalasan ke TPS. Golput sebagai wujud apatisisme politik bisa disematkan ketika seseorang memilih untuk tidak memilih hanya karena dia tidak peduli pada situasi politik yang terjadi. Hal ini merugikan proses demokrasi. Sedangkan golput yang dilandasi alasan ideologis bisa menguntungkan proses demokrasi karena sikap tersebut bisa dianggap sebagai kritik yang positif.

Memang, Pasal 28 UUD RI 1945 dan Pasal 23 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak tersebut. Bahkan, dalam dokumen resmi PBB tentang hak dan partisipasi dalam politik menyebut negara, termasuk Indonesia, menjamin hak atas kebebasan berekspresi. Meski begitu, sebagai warga negara yang baik dan cinta tanah air, partisipasi dalam pemilu perlu selalu ditingkatkan. Golput mestinya dikurangi bahkan dilarang!

Partisipasi dalam pemilu itu seharusnya menjadi kewajiban warga negara. Warga negara bertanggung jawab (wajib) memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan keadilan, kesejahteraan hidup bermasyarakat, serta kehidupan masyarakat inklusif. Untuk mewujudkan itu semua adalah sebuah kewajiban. Oleh karenanya, proses mewujudkannya juga merupakan kewajiban. Meski selama ini memilih adalah hak, hak tersebut harus menjadi kewajiban jika dibutuhkan untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam masyarakat demokratis.

Perlu ditegaskan, yang diwajibkan itu sejatinya adalah partisipasi politik warga negara. Apa pun keadaannya, warga negara wajib hadir dan mencoblos di TPS. Persoalan dia memilih atau tidak memilih, atau pun memilih lebih dari satu pilihan sehingga menyebabkan surat suara yang ia coblos tidak sah, itu adalah hak. Yang jelas dia turut serta dalam pemilu yang dibuktikan dengan kehadirannya di TPS. Bagi yang sakit parah, petugas di TPS tentu akan mendatangi warga untuk meminta partisipasinya dalam pemilu. Dan si warga wajib memilih. Terlepas pilihan politiknya jatuh kepada si A, B, atau C atau lebih dari satu pilihan atau pun tidak sama sekali, adalah hak yang bersangkutan. Yang penting dia sudah menggugurkan kewajibannya dengan berpartisipasi dalam pemilu.

Agaknya, kita patut belajar dari negara jiran Australia. Pemerintah Australia dengan mengutip Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa Pasal 29 tetap menerapkan hukum wajib coblos kepada warga negaranya. Sebab, keterlibatan semua warga dalam pemilu dianggap dapat meningkatkan keterwakilan suara semua lapisan masyarakat.

■ MOH. ILHAM A. HAMUDY

OBESITAS DI IBU KOTA

Kegemukan atau obesitas menjadi salah satu faktor problem kesehatan yang banyak dialami warga ibukota. Mengacu pada data riset kesehatan dasar yang di publikasikan Kementerian Kesehatan 2018, sebanyak 29,8 persen atau sekira satu dari tiga warga ibu kota mengalami obesitas. Angka ini menempatkan ibu kota diperingkat kedua teratas dalam hal promosi penduduk yang mengalami obesitas.



Program Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun yang sama merinci, obesitas banyak dialami oleh penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur. Proporsi warga yang mengalami obesitas mencapai 32,6 persen dari sekira 9000 penduduk yang beresiko obesitas di wilayah tersebut. Sementara proporsi warga yang mengalami obesitas di wilayah Jakarta Timur mencapai 26,1 persen.

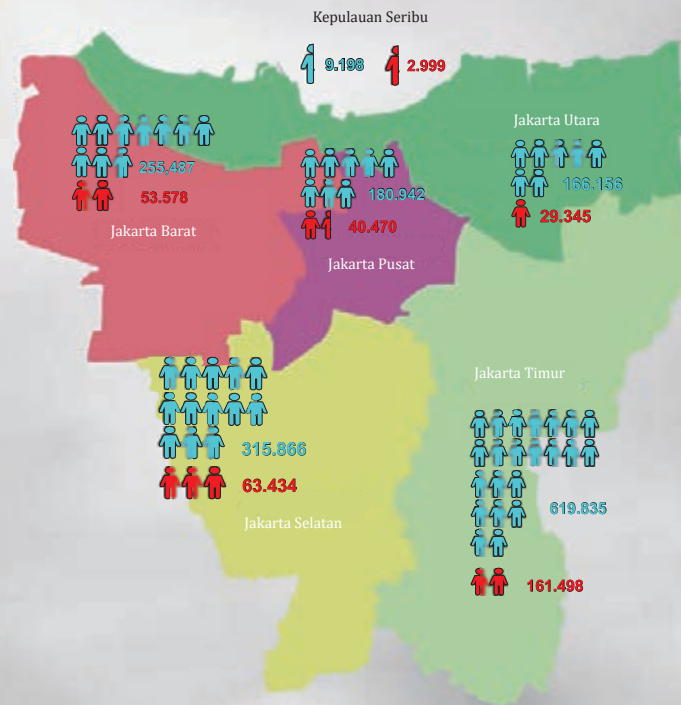
Proporsi Obesitas* DKI Jakarta dan Provinsi Lain Tahun (dalam persen)

Sulawesi Utara	30,2
DKI Jakarta	29,8
Kalimantan Timur	28,7
Papua Barat	26,4
Kepulauan Riau	26,2
Kaimantan Utara	26,1
Sumatera Utara	25,8
Maluku Utara	24,6
Gorontalo	24,4
Aceh	24,4
Riau	24,1
Bangka Belitung	23,7
Bali	23,3
Jawa Barat	23,0
Jawa Timur	22,4
Banten	22,1
Indonesia	21,8
DI Yogyakarta	21,4
Sulawesi Tengah	20,7
Sumatera Barat	20,4
Jawa Tengah	20,4
Papua	20,2
Bengkulu	19,9
Maluku	19,9
Kalimantan Selatan	19,5
Selawesi Tenggara	19,3
Selawesi Selatan	19,1
Kalimantan Tengah	18,7
Selawesi Barat	18,7
Jambi	17,6
Sumatera Selatan	17,4
Lampung	17,3
Kalimantan Barat	17
Nusa Tenggara Barat	14,9
Nusa Tenggara Timur	10,3

Penduduk yang mengalami Obesitas** di DKI Jakarta 2018

(dalam satuan orang)

-  Jumlah penduduk beresiko obesitas **
-  Jumlah penduduk dengan obesitas **



*Berdasarkan Publikasi Riset Kesehatan Dasar, Kemeterian Kesehatan. Merupakan obesitas dewasa di bawah umur >18 tahun menggunakan indikator indeks massa tubuh ≥ 27

**Berdasarkan screening faktor resiko obesitas melalui program ketok pintu Layani dengan Hati dan Pos Pmbinaan Terpadu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Merupakan obesitas dewasa umur >18 tahun menggunakan indikator indeks massa tubuh ≥ 27

CALL FOR PAPERS BINA PRAJA MAY & NOVEMBER



RESEARCH AND
DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS



JOURNAL OF HOME AFFAIRS GOVERNANCE

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs
Governance to
jurnal.kemendagri.go.id

INDEXED BY:



Accredited No 21/E/KPT/2018

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see jurnal.kemendagri.go.id | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0821 1139 3927 (Whatsapp Only)
jurnalbinapraja@yahoo.com